



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* adalah komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan acuan sehingga perlu dilakukan inventarisasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan daerah yang sejalan dan mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan Gubernur harus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) bersama Bupati / walikota di wilayahnya masing - masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan Pihak terkait lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sambas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN SAMBAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Desa adalah Desa di Kabupaten Sambas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kemudian disingkat dengan TPB adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
7. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah rencana aksi pencapaian target TPB tingkat daerah provinsi yang berisi komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan acuan penting serta pengarusutamaan dalam Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sambas 2016-2021.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan perangkat daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RAD Pelaksanaan TPB disusun untuk perencanaan sampai dengan tahun 2021.
- (2) RAD Pelaksanaan TPB meliputi 4 pilar dan 17 tujuan, yaitu :
 - a. Pilar Sosial
 - Tujuan 1 : Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
 - Tujuan 2 : Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
 - Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

- Tujuan 4 : Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang.
- Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
- b. Pilar Ekonomi
- Tujuan 7 : Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
- Tujuan 8 : Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
- Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.
- Tujuan 10 : Mengurangi ketidaksetaraan baik didalam sebuah negara maupun diantara negara-negara di dunia.
- Tujuan 17 : Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan.
- c. Pilar Lingkungan
- Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
- Tujuan 11 : Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan.
- Tujuan 12 : Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
- Tujuan 13 : Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- Tujuan 14 : Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan.
- Tujuan 15 : Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah.
- d. Pilar Hukum dan Tata Kelola
- Tujuan 16 : Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III

KETERKAITAN TPB DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Pengarusutamaan TPB harus dilakukan dalam proses perencanaan daerah dan diarahkan untuk menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah dengan mengacu pada RPJMN, target dan indikator TPB diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah, yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pencapaian target TPB tingkat daerah dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam RKPD.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas memfasilitasi OPD, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya untuk mendukung pencapaian TPB.

BAB IV DOKUMEN RAD

Pasal 5

Dokumen RAD Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 67

sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

A. MATRIKS BAGIAN I: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Output (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (2016)	Target Tahunan (3)					Alokasi Inflasi Alokasi Anggaran (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendana an (5)	Instansi Pelaksana (6)			
			2017		2018		2019				2020	2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target				Target	Target	
TUJUAN SDGs : 1. TANPA KEMISKINAN													
INDIKATOR SDGs: 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok													
PROGRAM 1 : PROGRAM REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL													
Kegiatan 1 : Fasilitasi, monitoring dan evaluasiistensi sosial bagi lanjut usia terlantar	1.1 Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	Orang	75.00	75	150	75	75.00	75	75	75	60,000,000	APBD	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kegiatan 2 : Fasilitasi, monitoring dan evaluasi program keserasian sosial (KS)	2.1 Fasilitas Program Keserasian Sosial (KS)	Lokasi	2	2	2	2	2	-	-	-	43,500,000	APBD	
Kegiatan 3 : Kegiatan Fasilitas Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	3.1 Jumlah Peserta Keluarga PKH yang terfasilitasi	KSM	10,100.00	10,100.0	9,172	10,060.0	18,699.00	10,020	9,980	9,940	610,000,000	APBD	
Kegiatan 4 : Kegiatan Fasilitas Pemulihan Orang terlantar, pekerja migran terlantar, orang dengan gangguan jiwa	4.1 Fasilitas Pemulihan orang terlantar, pekerja migran terlantar, orang dengan gangguan jiwa terlantar	Orang	70	50	158	50	55	50	50	50	323,100,000	APBD	
Kegiatan 5 : Monitoring Dan Evaluasi Jaminan Sosial Bagi Orang Dengan Cacatan	5.1 Monitoring dan Evaluasi Program Asistensi Sosial Orang Dengan Cacatan	Orang	132.00	132	132	132	132	132	-	-	57,000,000	APBD	
Kegiatan 6 : Monitoring dan Evaluasi Pantu Asuhan	6.1 Jumlah Pantu Asuhan yang dimonev	Panti Asuhan	5	5	5	5	5	5	-	-	25,000,000	APBD	
INDIKATOR SDGs: 1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui BPJS Bidang Kesehatan													
PROGRAM 1 : PROGRAM PENGUATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN													
Kegiatan 1 : Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (PKH Daerah)	1.1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (PKH Daerah)	Tahun				1	1	1	1	1	14,300,000,000		DINAS KESEHATAN
Kegiatan 2 : Pembinaan Pengelolaan Jaminan Pembiayaan Kesehatan	2.1 Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Jaminan Pembiayaan Kesehatan	Kegiatan				1	1	1	1	1	135,000,000		
Kegiatan 3 : Pengelolaan Data Pembiayaan Kesehatan	3.1 Terlaksananya Pengelolaan Data Pembiayaan Kesehatan	Dokumen				1	1	1	1	1	120,000,000		
INDIKATOR SDGs: 1.4.1 Proporsi penduduk / rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar													
PROGRAM 1: PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN DASAR													
Kegiatan 1 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan DTPK	2.1 Tersedianya Peningkatan Pelayanan Kesehatan DTPK												DINAS KESEHATAN
PROGRAM 2 : PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN TRADISIONAL, KOMPLEMENTER DAN KHUSUS													
Kegiatan 1 : Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Khusus (Mata, THT, MATRA)	1.1 Jumlah Pelayanan Khusus yang diberikan	Jenis				4	3	3	3	4	436,920,000		DINAS KESEHATAN
INDIKATOR SDGs: 1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap													
PROGRAM 1: PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR													
Kegiatan 1 : Peningkatan Imunisasi	1.1 Terlaksananya workshop program imunisasi dan evaluasi program imunisasi kepada petugas puskesmas dan rumah sakit					28 Puskesmas dan 3 Rumah Sakit							DINAS KESEHATAN
INDIKATOR SDGs: 1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan													
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH													
Kegiatan 1 : Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	2.1 Prasarana dan sarana sanitasi lingkungan					6 Pekerjaan Pembangunan		8 Pekerjaan Pembangunan					DINAS
Kegiatan 2 : Sharing PAMSIMAS III	2.1 Penyediaan sarana air minum dan sanitasi di Kab. Sambas					4 Paket		5 Paket					

Kegiatan 3 : Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Paket II)	2.1 Sama penyediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah					26 Pekerjaan Sarana Air Bersih		36 Pekerjaan Sarana Air Bersih							PERUMAHAN RAKYAT, PEMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan 4 : Pengelolaan Sanitasi Lingkungan (Paket II)	2.1 Prasarana dan sarana sanitasi lingkungan					10 Pekerjaan Pembangunan		14 Pekerjaan Pembangunan							
Kegiatan 5 : Pengelolaan Sanitasi Lingkungan (Paket III)	2.1 Prasarana dan sarana sanitasi lingkungan					10 Pekerjaan Pembangunan		14 Pekerjaan Pembangunan							
Kegiatan 6 : Legislasi Rancangan Perundang-undangan	2.1 Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik														

PROGRAM 2: PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

Kegiatan 1 : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lingkungan Paket I	1.1 Prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan	Pekerjaan	21	21	29	29	12	19	20					DAU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PEMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan 2 : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lingkungan Paket II	2.1 Prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan	Pekerjaan	23	23	29	29	17	28	20					DAU	
Kegiatan 3 : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lingkungan Paket III	3.1 Prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan	Pekerjaan	36	36	28	28	23	29	22					DAU	
Kegiatan 4 : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lingkungan Paket IV	4.1 Prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan	Pekerjaan	34	34	23	23	16	19	22					DAU	
Kegiatan 5 : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lingkungan Paket V	5.1 Prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan	Pekerjaan	22	22	24	24	18	26	22					DAU	
Kegiatan 6 : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lingkungan Paket VI	6.1 Prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan	Pekerjaan	21	21	16	16	18	26	22					DAU	
Kegiatan 7 : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lingkungan Paket VII	7.1 Prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan	Pekerjaan	-	-	40	40	16	21	25					DAU	
Kegiatan 8 : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lingkungan Paket VIII	8.1 Prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan	Pekerjaan	-	-	35	35	24	13	25					DAU	
Kegiatan 9 : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lingkungan Paket IX	9.1 Prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan	Pekerjaan	-	-	-	-	25	20	25					DAU	
Kegiatan 10 : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lingkungan Paket X	10.1 Prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan	Pekerjaan	-	-	-	-	20	20	25					DAU	
Kegiatan 11 : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lingkungan Paket XI	11.1 Prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan	Pekerjaan	-	-	-	-	22	20	25					DAU	
Kegiatan 12 : Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lingkungan Paket XII	12.1 Prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan	Pekerjaan	-	-	-	-	31	25	25					DAU	

INDIKATOR SDGs: 1.4.1 (j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran

PROGRAM 1 : PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Kegiatan 1 : Pelayanan NIK dan Akta Kelahiran secara online di Rumah Sakit dan Puskesmas	1.1 Akta Kelahiran bayi yang baru lahir di Rumah Sakit dan Puskesmas	Akta / NIK	3,000	1,000	2,995	3,000									DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
--	--	------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

INDIKATOR SDGs: 1.4.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah

PROGRAM 1 : PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Kegiatan 1 : Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Keartisan	1.1 Jumlah rakor sinkronisasi dan koordinasi program kegiatan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan, dan Keartisan	Rapat Koordinasi dalam 1 tahun		20	20										BAPPEIDA
---	--	--------------------------------	--	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

INDIKATOR sdg'S : 1.b.1 Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin, dan rentan

PROGRAM 1 : PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Kegiatan 1 : Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan	1.1 Terselenggaranya rakor dan sinkronisasi dan koordinasi Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	Rapat Koordinasi dalam 1 tahun		23	23										BAPPEIDA
--	--	--------------------------------	--	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TUJUAN SDGs : 2. TANPA KELAPARAN

Indikator SDGs : 2.1.1* Prevalensi Ketidakecukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

Program 1 : Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

Kegiatan 1 : Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1.1 Pengujian Sampel Bahan Pangan Segar	Bulan	12	12	12	12	12	3 pasar, 4 sampel	5 Pasar, 5 Sampel	5 Pasar, 6 sampel	267,000,000	APBD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
Kegiatan 2 : Lomba Cipta Menu	2.1 Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Kabupaten dan Provinsi, Partisipasi dalam Hari Pangan Sedunia	Bulan	12	12	12	12	12	3 Kali	3 Kali	4 Kali	725,000,000	APBD		
Kegiatan 3 : Pemanfaatan Lahan Pekarangan	3.1 Terlaksananya Pembinaan pada Kelompok Wanita Tani	Bulan	12	12	12	12	12	8 Desa	14 Desa	14 Desa	398,000,000	APBD		
Kegiatan 4 : Kegiatan Pemberdayaan Wanita dalam Rangka Pola Konsumsi Rumah Tangga	4.1 Jumlah KWT yang dibina/didampingi	Bulan	12	12	12	12	12	8 KWT	10 KWT	14 KWT	325,000,000	APBD		
INDIKATOR SDGs: 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan														
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN														
Kegiatan 1: Fasilitas Penanganan Daerah Rawan Pangan	1.1 Rehabilitasi Penanganan Daerah Rawan Pangan	Bulan	12	12	12	12	12	5 Desa	6 Desa	10 Desa	255,000,000	APBD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
Kegiatan 2: Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	2.1 Analisis Pola Konsumsi Pangan	Bulan	12	12	12	12	12	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	165,000,000	APBD		
Kegiatan 3 : Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	3.1 Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Bulan	12	12	12	12	12	5 Ton	5 Ton	7 Ton	459,000,000	APBD		
Kegiatan 4 : Fasilitas Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	4.1 Fasilitas Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Bulan	12	12	12	12	12	6 Gapoktan	8 Gapoktan	10 Gapoktan	255,000,000	APBD		
Kegiatan 5 : Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	5.1 Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Samarra	Bulan	12	12	12	12	12	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	352,000,000	APBD		
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun/balita														
PROGRAM 1: PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT														
Kegiatan 1: Penanggulangan dan Pencegahan Masalah Gizi	1.1 Jumlah sekolah dan perguruan tinggi mendapat penanggulangan dan pencegahan masalah gizi							10 sekolah	10 sekolah	15 sekolah	20 sekolah	30 sekolah	152,020,853	DINAS KESEHATAN
INDIKATOR SDGs: 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														
PROGRAM 1: PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN TRADISIONAL, KOMPLEMENTER DAN KHUSUS														
Kegiatan 1 : Pengembangan Pembentukan Kebun Gizi dan Obat Keluarga* Kebun GJOK*	1.1 KK/Desa yang memanfaatkan tanaman berkhasiat Gizi dan Obat (Gjok) untuk Asuhan Kesehatan							4 kelompok	4 kelompok	10 kelompok	15 kelompok	28 kelompok	182,050,000	DINAS KESEHATAN
INDIKATOR SDGs: 2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif														
PROGRAM 1: PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT														
Kegiatan 1: Pengembangan dan Orientasi Kelompok Peduli ASI	1.1 Jumlah Desa yang Memiliki Kelompok Peduli ASI							15 Petugas	15 Petugas	29 Petugas	28 Petugas	28 Petugas	200,255,000	DINAS KESEHATAN
Indikator SDGs: 2.2.2 (c) Kualitas Konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan.														
Program 1 : Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan														
Kegiatan 1 : Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)	1.1 Tersedianya referensi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat	Bulan	12	12	12	12	12	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	182,000,000	APBD	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN	
INDIKATOR SDGs: 2.c.1 Indikator annual harga pangan														
PROGRAM 1: PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN														
Kegiatan 1: Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	1.1 Jumlah Pengawasan Barang dan Jasa dalam satu tahun	Kali	15	15	10	15	15	16	18	20	400,000,000	DAU	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
Kegiatan 2: Monitoring Distribusi, Ketersediaan dan Harga Kebutuhan Pokok serta Barang Strategis Lainnya	2.1 Jumlah monitoring, distribusi, ketersediaan dan harga kebutuhan pokok serta barang strategis lainnya	Monitoring	18	10	18	12	15	17	17	20	535,000,000	DAU		
TUJUAN SDGs: 3. Kesehatan Sehat dan Sejahtera														
INDIKATOR SDGs: 3.1.1 Angka Kematian Ibu														
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU, ANAK, USIA PRODUKTIF DAN USILA														
Kegiatan 1: Pemanfaatan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Dan Survey Kematian Ibu	1.1 Jumlah ibu hamil yang terpantau dalam pelaksanaan P4K			13269		13044	13044	12823	12601	12332	182,050,000			
Kegiatan 2: Pelaksanaan Dan Pemantauan AMP	2.1 Pelaksanaan dan Pemantauan AMP			50		60	60	70	80	90	2,366,650,000			

Kegiatan 3: Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Ibu dan Anak	3.1 Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Ibu dan Anak		50		60	60	70	80	90	236.665,000		DINAS KESEHATAN	
Kegiatan 4: Kemitraan Bidan Dengan PKK	4.1 Kemitraan Bidan dengan PKK		90		110	110	130	150	170	273.075,000			
Kegiatan 5: Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.1 Jumlah Lansia yang mengikuti seminar lansia				200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	150.000,000			
Kegiatan 6: Gerakan Desa Bebas Kematian Ibu dan Bayi	6.1 Jumlah desa yang ikut Gerakan Desa Bebas Kematian Ibu dan Bayi				94 Desa	94 Desa	102 Desa	150 Desa	192 Desa	546.150,000			
Kegiatan 7: Pemantauan Wilayah Setempat	7.1 Bidan yang ikut melaksanakan pemantauan wilayah setempat				70 wilayah	70 wilayah	80 wilayah	90 wilayah	100 wilayah	120.000,000			
Kegiatan 8: Kampanye Gerakan Stop Kematian Ibu dan Bayi	8.1 Kesepakatan Kampanye Gerakan Stop Kematian Ibu dan Bayi				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	273.075,000			
PROGRAM 2: PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN KESEHATAN													
Kegiatan 1: Fasilitas Gerakan Turunkan Kasus Kematian pada Ibu dan Bayi	1.1 Jumlah ibu hamil dan suami mengikuti kegiatan fasilitas gerakan turunkan kasus kematian ibu dan bayi				380 bayi	380 bayi	1380 bayi	1680 bayi	1980 bayi	211.801,978			DINAS KESEHATAN
INDIKATOR SDGs: 3.1.2 Proporsi Perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.													
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU, ANAK, USIA PRODUKTIF DAN USILA													
Kegiatan 1: Kemitraan Bidan dan Dukur Bayi	1.1 Jumlah dukun bayi yang bemitra				610 dukun bayi	610 dukun bayi	610 dukun bayi	640 dukun bayi	650 dukun bayi	3.438.050,000		DINAS KESEHATAN	
INDIKATOR SDGs: 3.b.1 Proporsi Populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin terjangkau secara berkelanjutan													
PROGRAM 1: PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN													
Kegiatan 1: Peningkatan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi/Alat	1.1 Jumlah sarana produksi dan distribusi farmasi yang dilakukan pengawasan		25 sarana		35 sarana	35 sarana	40 sarana	45 sarana	50 sarana	182.050,000		DINAS KESEHATAN	
PROGRAM 2: PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN													
Kegiatan 1: Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.1 Tercapainya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan		2000 jenis		2000 jenis	2000 jenis	2000 jenis	2000 jenis	2000 jenis	67.766.292,000		DINAS KESEHATAN	
Kegiatan 2: Pengadaan Reagen Laboratorium	2.1 Jumlah jenis reagen laboratorium yang diadakan		25 jenis		25 jenis	25 jenis	25 jenis	25 jenis	25 jenis	291.280,000		DINAS KESEHATAN	
Kegiatan 3: Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi	3.1 Terpenuhinya kegiatan administrasi perkantoran di Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)		1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	291.280,000		DINAS KESEHATAN	
INDIKATOR SDGs: 3.b.2 Total Official Development Assistance (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar													
PROGRAM 1: PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN													
Kegiatan 1: Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	1.1 Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan laboratorium kesehatan daerah		1000 orang		1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	145.640,000		DINAS KESEHATAN	
INDIKATOR SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan													
PROGRAM 1: PROGRAM PENYEDIAAN TENAGA TEKNIS PERKANTORAN													
Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Perkantoran	1.1 Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jasa teknis perkantoran selama 1 tahun		165 orang		175 orang	175 orang	185 orang	195 orang	200 orang	9.171.820,000		DINAS KESEHATAN	
Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Tenaga SP4EPM	2.1 Jumlah penyediaan jasa tenaga SP4EPM		4 orang		4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	876.000,000			
INDIKATOR SDGs: 3.3.1(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa													
PROGRAM 1: PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR													
Kegiatan 1: Pelayanan dan Penanggulangan Kasus HIV/AIDS	1.1 Terlaksananya upaya penanggulangan HIV/AIDS		10 Kasus		20 kasus	20 kasus	30 Kasus	40 Kasus	50 Kasus	364.100,000		DINAS KESEHATAN	
INDIKATOR SDGs: 3.3.2 Kejadian TB per 1000 orang													
PROGRAM 1: PROGRAM PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT TB PARU													

Kegiatan 10: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Terigas	10.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	2,108,172,100	
Kegiatan 11: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Sambas	11.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	1,638,188,510	
Kegiatan 12: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Sembawang	12.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	691,273,640	
Kegiatan 13: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Sejangkung	13.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	1,638,188,510	
Kegiatan 14: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Sejod	14.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	1,806,564,900	
Kegiatan 15: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Subah	15.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator		
Kegiatan 16: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Satai	16.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	3,022,112,750	
Kegiatan 17: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Matang Sari	17.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	2,122,560,670	
Kegiatan 18: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Serdebaug	18.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	2,666,810,730	
Kegiatan 19: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Segarau	19.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	723,777,840	
Kegiatan 20: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Tekesang	20.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	1,435,820,210	
Kegiatan 21: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Sungai Baru	21.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	1,475,548,350	
Kegiatan 22: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Sekura	22.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	2,873,281,910	
Kegiatan 23: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Pimpinan	23.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	2,610,196,380	
Kegiatan 24: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Simpang Empat	24.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	1,447,889,990	
Kegiatan 25: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Paloh	25.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	4,194,928,500	
Kegiatan 26: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Temjuk	26.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	1,094,491,220	
Kegiatan 27: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Galing	27.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	2,705,643,650	
Kegiatan 28: Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial di Puskesmas Sjingan	28.1 Jumlah indikator SPM bidang kesehatan yang targetnya tercapai		12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	12 indikator	3,913,832,860	

DINAS KESEHATAN

INDIKATOR SDGs: 3.7.1.(b) Angka pengunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern

PROGRAM 1: PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Kegiatan 1: Bantuan Operasional Untuk Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisk)	1.1 Jumlah Balai Penyuluhan KB yang akan diberikan Bantuan Operasional selama 1 Tahun	19 Balai KB		19 Balai KB			19 Balai KB	19 Balai KB	19 Balai KB			
Kegiatan 2: Operasional Gudang Alat/obat dan Non Alat/Obat Kontrasepsi (DAK Non	2.1 Terlaksananya Operasional Gudang Alat Kontrasepsi	52 Klinik		51 Klinik			51 Klinik	51 Klinik	51 Klinik			

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

Kegiatan 19 : Fasilitas Persiapan, Penyaluran dan Penastuasahan untuk Tunjangan Guru	19.1 Tersedianya data pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				
Kegiatan 20 : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.1 Jumlah pembinaan dan kunjungan pengawas		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				
	20.2 Jumlah Rakor Pengawas										
Kegiatan 21 : Pelaksanaan Pemilihan Angka Kredit Guru dan Tenaga Kependidikan	21.1 Terbitnya SK Kenaikan Pangkat Guru dan Tenaga Kependidikan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				
Kegiatan 22 : Peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui jalur khusus (inklusi)	22.1 Meningkatnya pengetahuan pendidik		20 sekolah	20 sekolah	20 sekolah	20 sekolah	20 sekolah				
Kegiatan 23 : Pelatihan Peningkatan Mutu Guru Untuk Pembelajaran Yang Menyenangkan (joyful learning) di sekolah	23.1 Meningkatnya Pemahaman Guru guna Memotivasi peserta didik untuk termotivasi		80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang				
Kegiatan 23 : Seminar Nasional Pendidikan	23.1.1 Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan		100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang				
Kegiatan 24 : Pematapan Kinerja Pengawas Sekolah	24.1 Meningkatnya kinerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas dan		45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang				
Kegiatan 25 : Bimtek Pembuatan Karya Ilmiah Guru	25.1 Guru dapat membuat Karya Ilmiah		50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang				
Kegiatan 26 : Bimbingan Teknis Guru PAI	26.1 Guru PAI lebih berkompetensi		25 orang	25 orang	100 orang	100 orang	100 orang				
PROGRAM 3: PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN											
Kegiatan 1 : Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Gugus Sekolah dan Kelompok Kerja Guru	1.1 Monitoring dan Evaluasi Gugus Sekolah dan Kelompok Kerja Guru		12 bulan	12 bulan			12 bulan				
Kegiatan 2 : Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2.1 Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)		12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan				
Kegiatan 3 : Pelatihan Penerapan Manajemen Sekolah terhadap Guru	3.1 Pelatihan Penerapan Manajemen Sekolah terhadap Guru		12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan				
Kegiatan 4 : Sosialisasi Partisipasi Desa dalam Membangun Pendidikan	4.1 Terselenggaranya Sosialisasi Partisipasi Desa dalam Membangun Pendidikan		12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan				
Kegiatan 5 : Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi MKKS dan MGMP	5.1 Monitoring dan Evaluasi MKKS dan MGMP		12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan				
Kegiatan 6 : Pelaksanaan Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	6.1 Terbitnya Guru dan Pengawas Berprestasi		13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang				
Kegiatan 7 : Pembinaan Prestasi Peserta Didik di Layanan Keberbakatan	7.1 Terbitnya Daftar Peserta Didik		12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan				
Kegiatan 8: Pembinaan Dewan Pendidikan	8.1 Terbitnya Dewan Pendidikan		15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang				
Kegiatan 9 : Pembinaan Komite Sekolah	9.1 Terbitnya Komite Sekolah		200 orang	200 orang	-	-	200 orang				
Kegiatan 10 : Peningkatan Akreditasi Sekolah dan Madrasah	10.1 Meningkatnya Akreditasi Sekolah dan Madrasah		12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan				
Kegiatan 11 : Pembinaan dan Penataan Perpustakaan Sekolah	11.1 Perpustakaan Sekolah yang tertata dengan baik		100 Sekolah	100 Sekolah	-	-	150 sekolah				
Kegiatan 12: Pelaksanaan program reformasi birokrasi SKPD	12.1 Reformasi birokrasi yang baik		12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan				

Kegiatan 13 : Penyelenggaraan Pelatihan , Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang berbagai isu	13.1 Terselenggaranya Pelatihan , Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang berbagai isu pendidikan		12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan				
Kegiatan 14 : Penguatan Pendidikan yang Terintegrasi	14.1 Terlaksananya Penguatan Pendidikan yang Terintegrasi		193 Desa	193 Desa	193 Desa	193 Desa	193 Desa				
Kegiatan 15 : Pelatihan dan Penebaran Sekolah Hijau	15.1 Sekolah Hijau		10 sekolah	10 sekolah	-	-	10 sekolah				
Kegiatan 16 : Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	16.1 Evaluasi Hasil Kinerja		12 bulan	12 bulan	-	-	12 bulan				
Kegiatan 17 : Penastakhiran Data Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	17.1 Dapodik, Bekbone Dapodik, NUPTK dan NPSN Pendidikan Kabupaten Sekolah yang terupdate		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				
Kegiatan 18 : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	18.1 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				
Kegiatan 19 : Pembuatan Profil Pendidikan	19.1 Tersusunnya data pendidikan Kabupaten Sambas		12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan				
Kegiatan 20 : Pelaksanaan rapat koordinasi bidang pendidikan	20.1 Terlaksananya Musrenbang Forum										
	20.2 Terlaksananya Rakor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang				
Kegiatan 21 : Bimbingan teknis operator data pokok pendidikan (Dapodik) Kab. Sambas	21.1 Meningkatnya Kemampuan Operator di Sekolah dalam mengelola DAPODIK		530 orang	530 orang	530 orang	530 orang	530 orang				
Kegiatan 22 : Pelatihan inventaris barang di sekolah	22.1 Bendahara pengurus barang yang mampu membuat laporan aset dengan baik		40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang				
Kegiatan 23 : Gebyar Pendidikan Kabupaten Sambas	23.1 Peserta Didik, Guru, dan semua komponen pendidikan mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan		1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang				
Kegiatan 24 : Koordinasi dan Sosialisasi Ujian Sekolah dan Nasional	24.1 Jumlah peserta sosialisasi		19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan				
Kegiatan 25 : Fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah	25.1 Tereciptanya Sekolah Sehat		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				
Kegiatan 26 : Pelaksanaan Sistem Pengolahan dan Penyajian Data Pendidikan	26.1 Meningkatnya Sistem Informasi dan Manajemen Database Tata Kelola Sarana dan Prasarana Pendidikan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				
Kegiatan 27: Pendampingan Peningkatan IPM Bidang Pendidikan	27.1 Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di bidang Pendidikan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				
Kegiatan 28: Fasilitas Percepatan Peningkatan IPM Melalui Pendampingan SP4IPM	28.1 Peserta Fasilitas Pendampingan SP4IPM		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				
Kegiatan 29 : Pelatihan Pelaksanaan MBS, RKS, EDS, dan Penatausahaan Keuangan	29.1 Peserta Pelatihan pelaksanaan MBS, RKS, EDS, dan Penatausahaan Keuangan		50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang				
PROGRAM 4: PROGRAM PENINGKATAN PENUMBUHAN BUDI PEKERTI YANG BAIK BAGI GURU DAN PESERTA DIDIK											
Kegiatan 1 : Lomba Sekolah Berbudhi Pekerti / Akhlakul Karimah	1.1 Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba Berbudhi Pekerti / Akhlakul Karimah		12 JR	12 JR	12 JR	12 JR	12 JR				
Kegiatan 2 : Sosialisasi dan Pelatihan Keselamatan Kerja dan Keselamatan di Jalan Raya	2.1 Terselenggaranya Sosialisasi dan Pelatihan Keselamatan Kerja dan Keselamatan di Jalan Raya		40 Sekolah	40 Sekolah	40 Sekolah	40 Sekolah	-				

Kegiatan 12 : Bimtek Penulisan Karya Sastra Populer Peserta Didik SMP	12.1 Terselenggaranya Bimtek Penulisan Karya Sastra Populer Peserta Didik SMP			-	-	40 orang	40 orang	40 orang				
Kegiatan 13 : Lomba Olimpiade Sains SMP/MTs	13.1 Terlaksananya Lomba Olimpiade Sains SMP/MTs			120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang				
Kegiatan 14 : LCC Empat Pilar Kebangkitan Siswa SMP	14.1 Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat			40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang				
PROGRAM 6 : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN												
Kegiatan 1 : Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SMP	1.1 Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SMP			10 sekolah	10 sekolah	-	-	10 sekolah				
Kegiatan 2 : Pembangunan Ruang Serbu Guna (Aula) SMP beserta Perabotnya	2.1 Pembangunan Ruang Serbu Guna (Aula) SMP beserta Perabotnya			1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah				
Kegiatan 3 : Pembangunan Musholla SMP beserta perlengkapannya	3.1 Pembangunan Musholla SMP			4 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah				
Kegiatan 4 : Pembangunan Garasi/Tempat Parkir SMP	4.1 Pembangunan Garasi/Tempat Parkir SMP			0.02	0.02	0.01	0.01	0.02				
Kegiatan 5 : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Lainnya	5.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Lainnya			0.04	0.04	-	-	0.04				
Kegiatan 6 : Pembangunan Perpustakaan SMP beserta perabotnya	6.1 Ruang Perpustakaan yang dibangun			2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah				
Kegiatan 7 : Pembangunan Atrium SMP beserta Perabotnya	7.1 Atrium SMP beserta Perabotnya			1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah				
Kegiatan 8 : Pengadaan Peralatan Lab Komputer SMP	8.1 Peralatan Lab Komputer Sekolah			-	-	0.07	0.07	0.07				
Kegiatan 9 : Pengadaan Peralatan Seni Budaya dan Keterampilan SMP	9.1 Pengadaan Peralatan Seni Budaya dan Keterampilan SMP			10 sekolah	10 sekolah	-	-	10 sekolah				
Kegiatan 10 : Rehabilitasi Bangunan Sekolah Sehat SMP	10.1 Bangunan Sekolah Sehat SMP yang direhabilitasi			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				
Kegiatan 11 : Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SMP	11.1 Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SMP			10 sekolah	10 sekolah	-	-	10 sekolah				
Kegiatan 12 : Pengadaan Listrik SMP	12.1 Tersedianya Listrik sekolah			2 Sekolah	2 Sekolah	-	-	2 Sekolah				
Kegiatan 13 : Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SMP	13.1 Pengadaan Peralatan Pendidikan			0.04	0.04	-	-	0.04				
Kegiatan 14 : Pengadaan Peralatan dan Teknologi Smart SD dan SMP	14.1 Pengadaan Peralatan dan Teknologi Smart			-	-	-	-	-				
Kegiatan 15 : Pembangunan Pagar SMP	15.1 Pagar Sekolah			4 Sekolah	4 Sekolah							
Kegiatan 16 : Pengadaan Meubelair SMP	16.1 Tersedianya Meubelair Sekolah			2 Sekolah	2 Sekolah	60 Sekolah	60 Sekolah	2 Sekolah				
Kegiatan 17 : Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung SMP	17.1 Bangunan Sekolah yang direhabilitasi			0.12	0.12	0.10	0.10	0.13				
Kegiatan 18 : Pengadaan Buku/ Perpustakaan SMP	18.1 Terlaksananya Buku Pembelajaran di Sekolah			23.000	23.000	7.525	7.525	25.875				
Kegiatan 19 : Pengadaan Peralatan Olahraga SMP	19.1 Tersedianya alat praktik dan peraga siswa			20 sekolah	20 sekolah	-	-	20 Sekolah				
Kegiatan 20 : Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Beserta Perabotnya	20.1 Ruang Kelas Baru yang dibangun			0.17	0.17	0.17	0.17	0.21				
Kegiatan 21 : Penataan Halaman SMP	21.1 Tersedianya Halaman Sekolah			0.03	0.03	0.06	0.06	0.06				
Kegiatan 22 : Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP	22.1 Pengadaan Peralatan Laboratorium			0.04	0.04	-	-	0.04				
INDIKATOR SDGs: 4.1.1 (g) Rata-rata Lama Sekolah Pembuduk Umur ≥15 Tahun												
PROGRAM 1: PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL												

DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Kegiatan 11 : Pekan Olahraga dan Seni PAUD	11.1 Terlaksananya PORSENI PAUD			40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang					
Kegiatan 12: Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	12.1 Meningkatnya Kinerja KKG PAUD			20 sekolah	20 sekolah	20 Sekolah	20 Sekolah	20 Sekolah					
Kegiatan 13: Pembinaan guru TK				25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang					
INDIKATOR SDGs: 4.6.1. (a) Persentase angka melek aksara penduduk ≥ 15 Tahun													
PROGRAM 1: PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN													
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (SUKMA 3)	1.1 Terlaksananya Keaksaraan Fungsional Pelestarian Sukma 3	Orang		800	800	100	100	100					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kegiatan 2 : Gebyar Pendidikan Keaksaraan	2.1 Terlaksananya Gebyar Pendidikan Keaksaraan			3 Cabang	3 Cabang	3 Cabang	3 Cabang	3 Cabang					
INDIKATOR SDGs:													
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN													
Kegiatan 1 : Pengembangan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	1.1 Jumlah Pengadaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Buku		500	678	1,000	743	1,500	2,000	2,500			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Kegiatan 2 : Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perpustakaan	2.1 Jumlah perpustakaan yang dimonitoring	Perpustakaan		20	20	20	13	20	20	20			
Kegiatan 3 : Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pengolahan Bahan Pustaka	3.1 Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Pelestarian Bahan Pustaka	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1			
PROGRAM 2: PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN													
Kegiatan 1 : Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan	1.1 Jumlah tenaga pengelola perpustakaan desa yang diberikan pembinaan	Orang		20	20	20	9	10	13	16			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Kegiatan 2 : Fasilitasi Pengembangan Minat Baca Masyarakat	2.1 Jumlah Desa yang berikan fasilitas pengembangan minat baca	Desa		20	20	10	-	13	16	20			
PROGRAM 3 : PROGRAM PELAKSANAAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA													
Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Pelestarian Bahan Pustaka	1.1 Jumlah Bahan Pustaka yang ditingkatkan kualitasnya	Eksemplar		2,000	2,000	-	-	2,440	2,700	3,000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Kegiatan 2 : Pemeliharaan dan Perawatan Bahan Pustaka	2.1 Terlaksananya perawatan bahan pustaka	Eksemplar		20,000	20,000	20,000	7,604	20,000	20,000	20,000			
PROGRAM 4 : PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA GEMAR MEMBACA													
Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	1.1 Jumlah Layanan Perpustakaan Umum Daerah	Jenis		2	2	2	2	2	2	2			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Kegiatan 2 : Layanan Perpustakaan Keliling	2.1 Jumlah Pos Pelayanan Perpustakaan	Kecamatan		5	5	5	5	5	5	5			
INDIKATOR SDGs:													
PROGRAM 1: PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN													
Kegiatan 1: Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	1.1 Indikator Output	Jumlah opd yang diberikan pembinaan dan pengawasan kearsipan			47	47	19						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
INDIKATOR SDGs:													
PROGRAM 1: PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH													
Kegiatan 1: Penelusuran dan Pendataan Arsip Dinamis	1.1 Indikator Output	Jangka waktu Pemeliharaan		15	15	15	12	15	15	15			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Kegiatan 2: Penelusuran dan Pendataan Arsip Statis	2.1 Indikator Output	Jangka waktu Pemeliharaan		15	15	12	12	15	15	15			
TUJUAN SDGs : 5. KESETARAAN GENDER													
INDIKATOR SDGs: 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif													
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN													

Kegiatan 1 : Penanganan Korban Kekerasan dan Trafficking	1.1 Tersedianya Pelayanan Bagi Korban Kekerasan dan Trafficking	Tahun	1	1	1	1												DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
--	---	-------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDIKATOR SDGs:
PROGRAM 1: PROGRAM KERJASAMA DAN LINTAS SEKTOR

Kegiatan 1: Kegiatan Pengembangan Kapasitas bagi Mitra Kerja	1.1 Adanya dukungan dan fasilitasi stakeholder serta mitra kerja dalam mendukung program KKBPK	Kegiatan	3	3														DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
Kegiatan 2: Peningkatan dan Pembinaan Lini Lapangan (DAK Non Fisik)	2.1 Dukungan Dana bagi Kader PPKBD dan Sub PPKBD																	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM 2: PROGRAM ADVOKASI DAN KIE PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Kegiatan 1: Promosi Program KKBPK	1.1 Adanya Strategi Advokasi dan KIE tentang Program KKBPK	Kegiatan	5	5														DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
-----------------------------------	--	----------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TUJUAN SDGs : 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau

PROGRAM 1: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU

Kegiatan 1: Peningkatan dan pengembangan prasarana air baku	1.1.1 paket konsultasi penelitian (DED) dan 9 paket pembangunan sumur bor							100%		100%								DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PEMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN
---	---	--	--	--	--	--	--	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	---

INDIKATOR SDGs: 6.5.1 Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)

PROGRAM 2: PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

Kegiatan 1 : Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi				21 Paket														
Kegiatan 2 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Paket XXI)	2.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Paket XXI)							11 Paket										
Kegiatan 3 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket X)	3.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket X)			12 Paket				14 Paket		5 Paket								
Kegiatan 4 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket XI)	4.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket XI)			13 Paket				14 Paket		12 Paket								
Kegiatan 5 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket XII)	5.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket XII)							14 Paket		13 Paket								
Kegiatan 6 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Paket IX)	6.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Paket IX)			20 Paket				14 Paket		11 Paket								
Kegiatan 7 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Paket XIII)	7.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Paket XIII)							8 Paket		12 Paket								
Kegiatan 8 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket XIV	8.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket XIV									10 Paket								

Kegiatan 9: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket XV	9.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket XV					14 Paket							
Kegiatan 10 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket XVI	10.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket XVI					14 Paket							
Kegiatan 11 : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (IPDMIP)	11.1 Hibah IPDMIP					1 Paket		6 Paket					
Kegiatan 12 : Peningkatan jaringan irigasi (Paket I)	12.1 Peningkatan jaringan irigasi (Paket I)			2 Paket		2 Paket		2 Paket					
Kegiatan 13 : Peningkatan jaringan irigasi (Paket II)	13.1 Peningkatan jaringan irigasi (Paket II)			3 Paket		3 Paket							
Kegiatan 14 : Peningkatan jaringan irigasi (Paket III)	14.1 Peningkatan jaringan irigasi (Paket III)			3 Paket		2 Paket							
Kegiatan 15 : Peningkatan jaringan irigasi (Paket IV)	15.1 Peningkatan jaringan irigasi (Paket IV)			3 Paket		2 Paket							
Kegiatan 16 : Peningkatan jaringan irigasi (Paket V)	16.1 Peningkatan jaringan irigasi (Paket V)			3 Paket		3 Paket							
Kegiatan 17 : Rehabilitasi jaringan irigasi (Paket I)	17.1 Rehabilitasi jaringan irigasi (Paket I)			2 Paket		3 Paket							
Kegiatan 18 : Rehabilitasi jaringan irigasi (Paket II)													
Kegiatan 19 : Rehabilitasi jaringan irigasi (Paket III)				3 Paket									
Kegiatan 20 : Rehabilitasi jaringan irigasi (Paket IV)	20.1 Rehabilitasi jaringan irigasi (Paket IV)			3 Paket		3 Paket							
Kegiatan 21 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket V)	21.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket V)			3 Paket		2 Paket							
Kegiatan 22 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket VI)	22.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket VI)			4 Paket		3 Paket							
Kegiatan 23 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket VII)	23.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket VII)			2 Paket		3 Paket							
Kegiatan 24 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket VIII)	24.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket VIII)			3 Paket		14 Paket							
Kegiatan 25 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket XVII)	25.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket XVII)					18 Paket							
Kegiatan 26 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket XVIII)	26.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket XVIII)					11 Paket							
Kegiatan 27 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket XIX)	27.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket XIX)					17 Paket							
Kegiatan 28 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket XX)	28.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (paket XX)					14 Paket							

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PEMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR SDGs: 6.5.1.(c) Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air yang Dibentuk

PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

Kegiatan 1: Pembangunan Tebing Sungai	1.1 Pembangunan Tebing Sungai / Danau			4 Paket		1 Paket Konsultasi Penelitian dan 3 Paket Pembangunan Tebing Sungai/Danau		4 Paket Pembangunan Tebing Sungai					DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PEMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
---------------------------------------	---------------------------------------	--	--	---------	--	---	--	-----------------------------------	--	--	--	--	---

TUJUAN SDGs: 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke Layanan Keuangan

PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

Kegiatan 1 : Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	1.1 Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi hasil produksi	UMKM	10	10	3	10	1	10	15	15	355,000,000		DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	2.1 Jumlah wirausaha yang dilatih	UMKM	20	30	10	30	40	30	35	35	640,000,000		DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN

Kegiatan 3: Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan UMKM	3.1 Jumlah wirausaha yang dilatih	Kelompok	1	1	1	1	1	1	2	2	465000,000		DAN PERDAGANGAN
PROGRAM 2: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO													
Kegiatan 1: Fasilitas pengembangan usaha mikro	1.1 Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi	UMKM	15	30	40	50	70	50	50	50	380000,000	DAU	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN
PROGRAM 3: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN MANAJEMEN USAHA KOPERASI													
Kegiatan 1: Promosi produk usaha koperasi	1.1 Jumlah koperasi yang mengikuti promosi produk usaha koperasi	koperasi	3	2	3	2	8	2	2	2	405000,000	DAU	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN
Kegiatan 2: Penyediaan jaringan pendukung bagi usaha koperasi dan komunitas usaha	2.1 Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam komunitas usaha	koperasi	3	5	1	5	1	7	7	7	335000,000	DAU	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN
PROGRAM 4: PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH													
Kegiatan 1: Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	1.1 Jumlah industri kecil yang difasilitasi pemberian izin	IKM	5	5	5	15	15	5	5	5	345000,000	DAU	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kegiatan 2: Pelatihan Keterampilan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan	2.1 Jumlah IKM yang dilatih	IKM	30	-	-	20	18	24	30	30	330000,000	DAU	
Kegiatan 3: Promosi Produk Unggulan Daerah	3.1 Jumlah IKM yang mengikuti promosi produk Kabupaten Sambas	IKM	2	2	2	4	6	50	50	40	685000,000	DAU	
Kegiatan 4: Pemberian fasilitas kemudahan standarisasi, pengujian kualitas	4.1 Jumlah pengujian dan pembinaan keamanan mutu pangan	kali	8	3	8	3	7	3	3	3	390000,000	DAU	
Kegiatan 5: Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kerajinan dan Aneka Industri	5.1 Jumlah IKM yang dilatih dan dibina	IKM	10	-	-	80	4	95	95	90	350000,000	DAU	
INDIKATOR SDG:													
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA													
Kegiatan 1: Penuhupatan Tenaga Kerja	1.1 Jumlah Masyarakat mendapatkan Informasi, Pengetahuan dan Pemahaman	Orang		100	100	375	372	480	148	208	390,750,000	DAU	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kegiatan 2: Operasional Kantor Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-P2TKLN) Kabupaten Sambas	2.1 Pelayanan optimal bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia	Bulan		12	12	12	12	12	12	12	325000,000	DAU	
Kegiatan 3: Informasi Pasar Kerja	3.1 Terbentuknya Bursa Kerja Khusus di Kabupaten Sambas dan Tersainya Lowongan Pekerjaan	Lowongan Kerja		50	50	50	50	10	5	5	690,500,000	DAU	
INDIKATOR SDG:													
PROGRAM 1: PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN													
Kegiatan 1: Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial	1.1 Jumlah Lembaga Kerjasama LKS Bipartit yang terbentuk	LKS Bipartit		3	3	4	3	5	1	1	581,311,625	DAU	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kegiatan 2: Peningkatan Penerapan Pengupahan	2.1 Jumlah Pengusaha dan Pekerja yang mengikuti Bimtek dan Pengupahan	Perusahaan		3	3	5	4	4	2	3	348,825,600	DAU	
Kegiatan 3: Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Peneguhan dan Penyelesaian Hubungan Industrial	3.1 Jumlah Perjanjian Bersama (PB) yang Dihasilkan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Perjanjian Bersama	3	4	4	3	3	7	2	3	664,948,525	DAU	
INDIKATOR SDG:													
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN DAYA SAING TENAGA KERJA													
Kegiatan 1: Pelatihan Berbasis Kompetensi	1.1 Jumlah tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang		114	114	416	232	208	52	52	3,836,862,750	DAU	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kegiatan 2: Operasional Balai Latihan Kerja	2.1 Pelayanan Optimal bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia	Bulan		12	12	12	9	12	12	12	598,964,000	DAU	
Kegiatan 3: Sosialisasi Sistem Pelatihan Kerja Nasional	3.1 Jumlah Keterampilan Angkatan Kerja Bertambah	Orang		260	114	100	65	140	60	60	435,750,000	DAU	
INDIKATOR SDG:													
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BALAI LATIHAN KERJA													
Kegiatan 1: Pengadaan Instalasi Listrik Balai Latihan Kerja	1.1 Jumlah Daya Listrik yang Terpasang	Volt Ampere		8,600	8,600						197,650,000	DAU	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kegiatan 2: Pembangunan Fasilitas Pendukung Balai Latihan Kerja Sambas	2.1 Jumlah Unit Fasilitas Pendukung yang Dibangun	Unit		1	1						272,980,000	DAU	

INDIKATOR SDG:													
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI													
Kegiatan 1: Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Warga Transmigran	1.1 Jumlah Warga Transmigran yang Terfasilitasi Melalui Manajemen Usaha	KK		20	20	20	19	20	20	20	2,445,000,000	DAU	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kegiatan 2: Fasilitas Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	2.1 Jumlah Warga Transmigrasi yang Difasilitasi Mendapatkan Bantuan Usaha	KK		30	30	20	12	20	20	20	269,500,000	DAU	
INDIKATOR SDG:													
PROGRAM 1: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAWASAN TRANSMIGRASI													
Kegiatan 1: Peningkatan Kemampuan (capacity building) tokoh masyarakat kawasan	1.1 Jumlah Tokoh Masyarakat Kawasan Transmigrasi yang Ditingkatkan	Orang		45	45	50	52	50	50	50	243,500,000	DAU	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kegiatan 2: Pemberian Sosial Budaya	2.1 Jumlah Warga Transmigran yang Mendapatkan Pemberian Sosial Budaya	Orang		50	50	35	93	35	35	35	255,500,000	DAU	
INDIKATOR SDG:													
PROGRAM 1: PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI													
Kegiatan 1: Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.1 Jumlah Usulan Rencana Identifikasi Kawasan Transmigrasi yang Disusun	Kecamatan		1	1			1	1	1	52,000,000	DAU	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kegiatan 2: Penyusunan Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)	2.1 Meningkatnya Kesejahteraan Warga Transmigran	Kecamatan		1	1	1	1	2	2	4	434,000,000	DAU	
INDIKATOR SDG:													
PROGRAM 1: PROGRAM PENATAAN PENEMPATAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI													
Kegiatan 1: Identifikasi dan Verifikasi Penempatan Warga Transmigrasi (PWT)	1.1 Jumlah Penempatan Warga Transmigrasi (PWT) yang Teridentifikasi dan Terverifikasi	Lokasi		3	3	3	2	4	4	4	327,000,000	DAU	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
INDIKATOR SDG:													
PROGRAM 1: PROGRAM PUBLIKASI PEMBANGUNAN DAERAH													
Kegiatan 1: Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	1.1 Terikutinya Pameran Pembangunan Daerah	Pameran	1	1	1	1	1	1	1	1	175,000,000	DAU	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
INDIKATOR SDG:													
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA													
Kegiatan 1: Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	1.1 Jumlah Promosi Pariwisata yang dilaksanakan	Pameran	4	2	2	2	2	2	2	2	575,000,000	DAU	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Kegiatan 2: Fasilitas Penyelenggaraan Festival Wonderful Indonesia	2.1 Terfasilitasinya kegiatan Festival Wonderful Indonesia	Event	1	1	1	1	1	-	-	-	198,801,400	DAU	
INDIKATOR SDG:													
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA													
Kegiatan 1: Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan (DAK)	1.1 jumlah prasarana pariwisata yang dibangun	Sarana	-	5	5	6	6	7	8	9	37,597,654,875	DAK	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Kegiatan 2: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)	2.1 jumlah prasarana pariwisata yang dibangun	Sarana	7	10	10	12	12	13	14	15	60,000,000,000	DAK	
Kegiatan 3: Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi	3.1 jumlah pelaku industri pariwisata yang dibina	Orang	-	15	15	15	15	20	20	20	430,000,000	DAU	
Kegiatan 4: Pemeliharaan/perawatan sarana promosi pariwisata	4.1 Jumlah sarana promosi pariwisata yang dipelihara	Sarana	2	2	2	-	-	3	3	4	255,000,000	DAU	
INDIKATOR SDG:													
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN													
Kegiatan 1: Pengembangan dan Pengujian, Informasi dan Database	1.1 Terupdatenya data bidang Kepariwisata	Jenis	1	1	1	1	1	1	1	1	230,000,000	DAU	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Kegiatan 2: Fasilitas Peserta Putri Pariwisata	2.1 Terfasilitasinya Putri Pariwisata Kab. Sambas	Orang	-	1	1	1	1	1	1	1	200,000,000	DAU	
INDIKATOR SDG:													
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN ATRAKSI DAYA TARIK WISATA													
Kegiatan 1: Lomba Sampan Bedar	1.1 Terlaksananya Lomba Sampan Bedar	Tim	30	30	30	30	30	30	30	30	375,000,000	DAU	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Kegiatan 2: Festival Saprahan	2.1 Terlaksananya Festival Saprahan	Event	-	1	1	-	-	-	-	-	75,000,000	DAU	

TUJUAN SDGs : 9. INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR														
INDIKATOR SDG's : 9.1.1 Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak														
PROGRAM 1: PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN														
Kegiatan 1: Peningkatan Jembatan (Poros Desa) Paket X	1.1 Peningkatan Jembatan (Poros Desa) Paket X						5 Paket							DINAS PEKERJAAN
INDIKATOR SDG's : 9.1.2.(b) Jumlah Dermaga penyeberangan														
PROGRAM 1 : PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN														
Kegiatan 1: Pembangunan Dermaga (Paket I)	1.1 Jumlah Pembangunan Tambatan Perahu yang Terbangun selama 1 Tahun	Unit	100	18	18	18	20							DINAS PERHUBUNGAN
Kegiatan 2 : Pembangunan Dermaga (Paket II)	2.1 Jumlah Pembangunan Dermaga yang Terbangun selama 1 Tahun	Unit	50	6	6	6	15							
Kegiatan 3: Pembangunan Dermaga (Paket III)	3.1 Jumlah Pembangunan Dermaga yang Terbangun selama 1 Tahun	Unit	1	4	4	4	0							
TUJUAN SDGs : 10. BERKURANGNYA KESENIANGAN														
INDIKATOR SDG's : 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri														
PROGRAM 1: PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DESA DAN PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT														
Kegiatan 1: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1.1 Jumlah LKD yang dibina	Desa	10	10	10	10	10	10	10	10	58,600,000	APBD	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Kegiatan 2 : Peningkatan Kapasitas LPM	2.1 Anggota LPM Desa yang dilatih	Orang	0	0	0	20	20	60	30	30	30,000,000	APBD		
Kegiatan 3: Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3.1 Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	145,900,000	APBD		
Kegiatan 4 : Pembinaan PKK Desa	4.1 Jumlah PKK Desa yang dibina	Desa	0	10	10	10	5	20	10	10	60,000,000	APBD		
Kegiatan 5: Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera	5.1 Desa Lokasi P2WKSS yang dibina	Desa	2	2	2	2	2	2	2	2	100,100,000	APBD		
Kegiatan 6: Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)	6.1 Inventarisasi Dana Bergulir SPP dan Ase PNPM Mandiri Perdesaan Lainnya	Kecamatan	18	18	18	18	18	18	18	18	81,000,000	APBD		
PROGRAM 2: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, LEMBAGA EKONOMI DESA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN														
Kegiatan 1: Kegiatan Penguatan Lembaga Ekonomi Desa	1.1 Jumlah Lembaga BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang dikuatkan	BUMdes	17	5	5	45	69	71	140	180	245,480,100	APBD	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Kegiatan 2: Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.1 Koordinasi, Konsultasi, Bimtek, Rakernas, Sosialisasi, dan Pelatihan	Kegiatan	1	1	1	1	1	0	0	0	63,500,000	APBD		
Kegiatan 3: Sosialisasi Informasi Teknologi Tepat Guna	3.1 Informasi Teknologi Tepat Guna yang disampaikan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	130,167,900	APBD		
Kegiatan 4: Kegiatan Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna	4.1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Pengurus Posyantek	Posyantek	0	0	0	3	6	5	5	5	21,357,400	APBD		
Kegiatan 5: Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	5.1 Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	2	62,292,800	APBD		
Kegiatan 6: Fasilitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	6.1 Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa	Kecamatan	0	19	19	19	19	19	19	19	92,724,200	APBD		
Kegiatan 7 : Monev dan Fasilitas Tenaga Pendamping Desa	7.1 Sinkronisasi Program dari Kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten	Kecamatan	0	0	0	19	19	19	19	19	26,000,000	APBD		
PROGRAM 3 : PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA														

Kegiatan 1 : Fasilitas Evaluasi APBDes	1.1 APBDes yang dievaluasi	Desa	193	193	193	193	193	193	193	193	129,103,770	APBD	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kegiatan 2: Monitoring Pelaksanaan APBDes	2.1 Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Desa	193	193	193	193	193	193	193	193	223,072,225	APBD	
Kegiatan 3 : Fasilitas Penyusunan Administrasi Desa	3.1 Dokumen Administrasi Desa (Perbup, Surat Edaran, dll)	Desa	193	193	193	193	193	193	193	193	255,741,720	APBD	
Kegiatan 4: Fasilitas dan Pembinaan Penyusunan Profile Desa	4.1 Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Penyusunan Profil Desa	Desa	22	18	35	30		30	40	40	147,480,000	APBD	
Kegiatan 5: Kegiatan Fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	5.1 Jumlah Kecamatan yang Lembaga BPDnya terfasilitasi	Kecamatan	19	19	19	19	19	19	19	19	73,467,830	APBD	
Kegiatan 6 : Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	6.1 Peserta Pelatihan	Orang	0	0	0	70	70	30	30	30	96,025,000	APBD	
Kegiatan 7 : Pelatihan Pengembangan Kapasitas bagi Kepala Desa Baru	7.1 Peserta Pelatihan	Orang	0	0	0	17	17	0	123	0	42,587,750	APBD	
Kegiatan 8 : Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	8.1 Tersedianya Aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa yang Mampu Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes	Orang	193	193	193	193	193	193	193	193	202,539,800	APBD	
INDIKATOR SDG's : 10.2.1.(b) Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)													
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH													
Kegiatan 1 : Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	1.1 Jumlah Penanganan Perkara Perdata/TUN di dalam dan di luar sidang						2 Perkara			3 Perkara			SEKRETARIAT DAERAH
TUJUAN SDG's : 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN													
INDIKATOR SDG's : 11.2.1.(a) Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum di Perkotaan													
PROGRAM 1: PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN													
Kegiatan 1: Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	1.1 Jumlah Pembangunan Halte Bus selama 1 Tahun	Unit	10	6	6	6	2						DINAS PERHUBUNGAN
TUJUAN SDG's : 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH													
INDIKATOR SDG's : 16.10.1.(a) Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)													
PROGRAM 1 : PROGRAM SOSIALISASI DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN													
Kegiatan 1 : Fasilitas dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	1.1 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah												SEKRETARIAT DAERAH
INDIKATOR SDG's : 16.10.2.(c) Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan													
PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA													
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Layanan Pusat Informasi Publik	1.1 Kelancaran Arus Informasi serta Kelancaran Tugas PPID Kabupaten Sambas	Bulan		12	12	12	12	12	12	12	12		DINAS KOMUNIKASI DAN
INDIKATOR SDG's : 16.2.1.(b) Prevalensi Keterasan terhadap Anak Laki-laki dan Perempuan													
PROGRAM 1: PROGRAM KESERASAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK													
Kegiatan 1: Pelatihan Pendidikan dan kreatifitas anak	1.1 Jumlah Kelompok yang Terbina			200 orang			100 orang						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
INDIKATOR SDG's : 16.6.1.(a) Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)													
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													
Kegiatan 1 : Penyusunan Laporan Keuangan PPKD	1.1 Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Laporan		1			1		1	1	1		

Kegiatan 1 : Pengelolaan Jabatan Fungsional	1.1 Jumlah pemangku jabatan fungsional	Pejabat	5066	5000	4527	4500		4.000	5.000	5.000			BKPSDMAD
INDIKATOR SDGs: 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)													
PROGRAM 1 : PROGRAM PENGEMBANGAN APARATUR DALAM JABATAN													
Kegiatan 1 : Pengelolaan Jabatan Struktural	1.1 Jumlah jabatan struktural	Jabatan	828	853	853	827		853	853	853			BKPSDMAD
Kegiatan 2 : Pengelolaan Haperjakat/Tim Penilai	2.1 Jumlah pertimbangan yang dikeluarkan oleh Haperjakat/Tim Penilai Kinerja PNS	Pertimbangan	20	20	20	20		20	20	20			
Kegiatan 3 : Pelantikan dan Pengakuan ASN dalam Jabatan	3.1 Jumlah PNS yang mendapatkan promosi jabatan			75 PNS		75 PNS		75 PNS	75 PNS	75 PNS			
PROGRAM 2 : PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR													
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Seleksi Penguian Jabatan	1.1 Jumlah JPT dan Administrasi yang pengisiannya dilakukan melalui seleksi	Jabatan		4	1	6							BKPSDMAD
INDIKATOR SDGs: 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik													
PROGRAM 1 : PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
Kegiatan 1 : Kunjungan kerja Pimpinan & Anggota DPRD dalam daerah	1.1 Hasil rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah			17 kali		17 kali		17 kali					SEKRETARIAT DPRD
INDIKATOR SDGs: 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran													
PROGRAM 1 : PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL													
Kegiatan 1 : Pendaftaran dan Pencatatan Kematian	1.1 Jumlah Akta Kematian			500 akta		7500 Akta Kelahiran dan 2000 Akta Kematian		500 akta	500 akta	500 akta			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
TUJUAN SDG's : 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN													
INDIKATOR SDGs: 17.19.2.(c) Jumlah Pengunjung Eksternal yang Mengakses Data dan Informasi Statistik melalui Website													
PROGRAM 1:													
Kegiatan 1 : Kegiatan Dan Pemeliharaan Updating Website	1.1 Jumlah Pengelolaan dan Updating Data Website selama 1 Tahun			360 kali		360 kali							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	1.2 Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan E-Government melalui Pengelolaan Website selama 1 Tahun					3 Kali							

TUGAS 4: PONDORAN ETIKALITAS													Nambian		
INDIKATOR: Persentase anak usia 0-6 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial menurut jenis kelamin															
INDIKATOR: Angka Partisipasi Malar (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)															
INDIKATOR SDGs: Mengajukan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan															
INDIKATOR SDGs: Menciptakan kemitraan untuk mencapai tujuan															
PROGRAM 1: Program Pendidikan Anak Usia Dini															
Kegiatan 1															
Pembangunan sarana belajar	Tersedianya alat permainan edukatif untuk PAUD	Kegiatan						4	4	4	4	300.000.000	Partisipasi (Inkl dan Sosialis), dan Nambian	Kab. Sambas	Ayiah Kabupaten Sambas dan Nambian Ayiah Diabawahi PDA
Kegiatan 2															
Penyenggaraan pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan TK	PAUD dan TK											00 Partisipasi (Inkl dan Sosialis), dan Nambian	Kab. Sambas	Ayiah Sambas Diabawahi PDA
Kegiatan 3															
Persediaan sarana belajar yang edukatif untuk semua PAUD	Persentase PAUD yang dibekali dengan sarana belajar dan permainan edukatif yang memadai	%							100	100	100		Data Usaha, Partisipasi, Danas	Kab. Sambas	Ayiah Partisipasi Danas dan Nambian Ayiah
Kegiatan 1															
Perencanaan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD dan TPQ Masyarakat Rayah	Unit						2	2	2	2	180.000.000	Data Usaha, Partisipasi, Danas	Das Sumber Manusia, Dan Pening Tarung Mekar	Nambian Ayiah
Kegiatan 2															
Persediaan sarana belajar yang edukatif untuk semua PAUD	Persentase PAUD yang dibekali dengan sarana belajar dan permainan edukatif yang memadai	%							100	100	100		Data Usaha, Partisipasi, Danas	Das Sumber Manusia, Dan Pening Tarung Mekar	Nambian Ayiah
INDIKATOR: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.															
PROGRAM 2: Pro-Ingkaid (Promosi Inklusif Masyarakat Sipil Dalam Mendukung Pendidikan yang berkualitas dan Inklusif di Kab. Sambas)															
Kegiatan 1: Kegiatan-kegiatan															
Peningkatan Kapasitas CSO dalam mendorong Pendidikan Yang Inklusif dan Berkualitas	Meningkatnya kapasitas teknis CSO dalam proses tata kelola lokal dan mempengaruhi kebijakan pendidikan dasar yang berkualitas dan inklusif	Kelompok Masyarakat Sipil						15 Kelompok				100.000.000/pertahun	Yappika-EU	Kab. Sambas	Gemawan
Kegiatan 2: Pemberian dan Pemberdayaan Komunitas Sekolah untuk menyelesaikan persoalan sekolah	Adanya Komunitas Sekolah yang kuat dalam menyelesaikan masalah-masalah sekolah	Kelompok Masyarakat						10 Komunitas				60.000.000/pertahun	Yappika-EU	Kab. Sambas	
Kegiatan 3: Kajian Kebijakan Pendidikan	Adanya dokumen policy brief yang direkomendasikan kepada pengambil kebijakan	Draft Kebijakan						1 dokumen penelitian	2 Policy brief			100.000.000	Yappika-EU	Kab. Sambas	
Kegiatan 3: Kampanye Media	Meningkatnya dukungan publik akan isu pendidikan dasar yang berkualitas dan inklusif	Orang						5000 orang	7000			50.000.000	Yappika-EU	Kab. Sambas	
INDIKATOR SDGs: Melindungi, memulihkan, dan membangun pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta melindungi-lan kehilangan keanekaragaman hayati.															
PROGRAM 1: Mendukung Akses dan Pengelolaan Atas Hutan dan Lahan Yang Lestari															
Kegiatan 1: Advokasi Tata Ruang Desa	Terselenggaranya lahan produktif dan hutan dari konversi ke industri ekstraktif	Ha			20.000	20.500	30.000	48.000	10.000	20.000		100.000.000	Ford dan Misror	Kab. Sambas	Gemawan District Sambas
Kegiatan 2: Program Perhutanan Sosial	Adanya pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Sambas	Ha Kawasan								15.000		150.000.000	Ford Misror	Kab. Sambas	Gemawan dan SERUMPUN
Kegiatan 3: Promosi Desa Wisata	Meningkatnya Jasa Lingkungan Kawasan Hutan dan Desa di Sambas	Desa								1		25.000.000	Ford	Kab. Sambas	Gemawan dan SERUMPUN
Kegiatan 4: Dampak Pertanian di Kawasan Gambut	Adanya manfaat ekonomi sekaligus perlindungan Kawasan Gambut	Desa							6 Desa			100.000.000	BRG-UNDP	Kab. Sambas	Gemawan dan Pades BRG
INDIKATOR SDGs: Mengajukan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan															
PROGRAM 1: Menumbuhkan Agen dan Lembaga Yang Mempromosikan Perhutanan, Keadilan dan Inklusifitas															
Kegiatan 1: Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil yang Inklusif	Adanya kelompok masyarakat yang inklusif dan menjadi agen perhutanan	Orang			200	200	250	250	250	300			Mandiri Masyarakat	Kab. Sambas	Serangan dan Kelompok Masyarakat
Kegiatan 2: Workshop dan Pelatihan Penguatan Desa	Adanya lembaga pemerintahan desa yang kuat dan Mandiri	Desa			5	5	10	8	10	15		50.000.000	Misror	Kab. Sambas	Gemawan
INDIKATOR SDGs: Menciptakan kemitraan untuk mencapai tujuan															
PROGRAM 1: Engagement															

Kegiatan 1: Workshop dan Komunikasi dengan Instansi Pemerintah desa/Kabupaten	Terbangunnya komunikasi yang baik antara CSO dan Pemerintah Daerah	Frekwensi	5	5	7	7	10	10	50.000.000	Gersawan	Kah. Saribas	Usman Kantor Postarak dan Sambas	
PROGRAM 1 : Pengembangan Mekanisme Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) Terintegrasi		Referral Sistem	0		2	4	4		Rp 305,702,348.00	Desa Sebanga, Desa Kaliku, Desa Saranah, Desa Sungai Bering Kec. Sajingan Besar, Desa Tambatan, Desa Sebangi, Desa Lela, Desa Sayang Sebangi dan Desa Tumbuhkembang Kan.	Sumbangan yang berasal dari donatur (individu dan instansi/lembaga) baik lokal dan internasional (asing)	Kerjasama dengan OPD/P2A, Disdukcapil, DinasPMD, Penda	
Kegiatan 1 : Mapping pro child issue and policy at primary focus area (including child protection)													
Kegiatan 2 : Workshop on dissemination of field assessment result among stakeholders													
Kegiatan 3 : Raising awareness on child protection issues for parents, children, community													
Kegiatan 4 : Develop program/activities at community level to strengthen child protection system/mechanism													
Kegiatan 5 : Training volunteer on child issues (various levels)													
Kegiatan 6 : Monitoring children at various focus													
Kegiatan 7 : Utilization of monitoring data with partner to improve program delivery													
Kegiatan 8 : Monitoring action plan													
Indikator : Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kompetensi minimum dalam: (1) membaca, (2) matematika													
PROGRAM 3 : Pendidikan Karakter Kontekstual "Sekolah Hijau"		Sekolah Dasar	1				3	6	10	Rp 647,407,611.00	30 SD di Desa Sebanga, Desa Kaliku, Desa Saranah, Desa Sungai Bering Kec. Sajingan Besar, Desa Tambatan, Desa Sebangi, Desa Lela, Desa Sayang Sebangi dan Desa Tumbuhkembang Kan.	Sumbangan yang berasal dari donatur (individu dan instansi/lembaga) baik lokal dan internasional (asing)	Orang Peribadi dan Masyarakat, UPT, Pengawas, Sekolah, Komar
Assessment on characteristic/level of contextual education													
School assessment on contextual character education													
Training for child friendly environment for teaching and learning (learning process, good character, positive discipline, child right, child protection)													
Series of training on contextual character education													
Developing and strengthening teacher working group													
Developing guideline or module of contextual character education													
Dissemination of contextual character education value for parents													
Series of training of facilitator (facilitation skill, child right, child participation, leadership and group)													
Facilitate children's group activities													
Training on developing school improvement plan for principals													
Conduct series of training on school monitoring system													
Workshop/socialization, promotion of best practice to develop mutual understanding between engaged													
Kegiatan 2	pemberian beasiswa pendidikan selama liburan bagi masyarakat miskin yang melaksanakan kejar lajean, penerapan kreatif				0	2	4	4	66.000.000			Latihna Saribas	
Indikator : Pada tahun 2020, meniadakan secara signifikan jumlah penduduk dan rang derman yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan behavioral, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan keberlanjutan umum secara global													
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)													
Program : Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)													
Kegiatan 1 :													

BM Pelatihan Pembuatan Handicraft dari Kain Perca dan Ribbon Art Untuk Meningkatkan Keaktifan 2	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan ekonomi Peningkatan pemahaman masyarakat	kelompok masyarakat	1								4800000	Potensi	peloh	Potensi
Pelatihan Pemasaran Alam Tambar Sambilan dan Manajemen Usaha Dalam Rangka Peningkatan Nilai Keaktifan 3	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan ekonomi Peningkatan pemahaman masyarakat	kelompok masyarakat	1								5381000	Potensi	desa sumber harapan	Potensi
Penggunaan Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin Persekol Padi Keaktifan 4	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan ekonomi Peningkatan pemahaman masyarakat		1								7320000	potensi	lhas	Potensi
PEMBUATAN MESIN PENCACAH RUMPUT SERTA PELATIHAN PEMBUATAN Keaktifan 5	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan ekonomi Peningkatan pemahaman masyarakat					1		1			19030000	Potensi	Lambang	Potensi
DESAIN GRAFIS UNTUK DEKAL PELUANG USAHA Keaktifan 6	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan pemahaman masyarakat	kelompok masyarakat				1		1			16700000	Potensi	Seriran	Potensi
PENINGKATAN KETERAMPILAN KELOMPOK Keaktifan 7	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan pemahaman masyarakat	kelompok masyarakat				1		1			11350000	Potensi	desa sumber harapan	Potensi
PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK DALAM Keaktifan 8	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan pemahaman masyarakat	kelompok masyarakat				1		1			11000000	Potensi	Seriran	Potensi

TUJUAN 2: KESEHATAN GENDER

INDIKATOR: Persentase beban kesehatan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

PROGRAM 1: Program Peningkatan beban kesehatan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

Keaktifan 1	Soal-soal terkait kesehatan dan beban kesehatan dalam berbagai bentuk dan ukuran	Keaktifan														
	Penyakit (sustanasi) perempuan terhadap beban kesehatan dalam berbagai bentuk dan ukuran		2			2		2			2	2	30.000.000	Pilantopi dan Perikanan	Kab. Sembak	Wilyah Kabupaten Sembak

INDIKATOR: Proposal perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus tidak kawin sebelum umur 18 tahun dan sebelum umur 14 tahun

INDIKATOR: Modal awal kawin pertama perempuan umur 20-40 tahun

INDIKATOR: Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)

INDIKATOR: Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)

INDIKATOR: Total Fertility Rate (TFR)

PROGRAM 1: Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Keaktifan 1	Soal-soal tentang kesehatan Reproduksi Remaja (PRR)															
	Jumlah remaja yang menerima KIR	lingk														
			300			300		300			300		101.800.000	00 Piantopi (Jelai dan Sodegohi) dan Kambisan	Kab. Sembak	Wilyah Kabupaten Sembak
Keaktifan 2: Pendidikan dan Aktivasi Pemuda Remaja	Jumlah Pemuda Remaja yang SMP	unit														
			1			1		1			2		30.000.000		Kab. Sembak	Piantopi (Jelai dan Sodegohi) Dana Usaha
Keaktifan 3: Sosialisasi Penyuluh Remaja dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah kegiatan sosialisasi yang diadakan setiap tahun	kegiatan														
			0			0		1			2		15.000.000		Kab. Sembak	Piantopi (Jelai dan Sodegohi) Dana Usaha
Keaktifan 4: Layanan Konseling dan Perencanaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah yang melakukan konseling dan perencanaan kesehatan reproduksi remaja	lingk														
			0			0		00			00		30.000.000		Kab. Sembak	Piantopi (Jelai dan Sodegohi) Dana Usaha

PROGRAM 2: Program Peningkatan Pelembagaan dan Kesehatan Gender dalam Pembangunan

Keaktifan 1	Soal-soal terkait dengan Kesehatan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak															
	Jumlah kegiatan sosialisasi yang terkait dengan Kesehatan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak	kegiatan														
			300			300		300			300		101.800.000	Piantopi (Jelai dan Sodegohi) dan Kambisan	Kab. Sembak	Wilyah Wilyah Wilyah Kabupaten Sembak

INDIKATOR: Proporsi kawin yang dibarengi perempuan di DPRD

INDIKATOR: Proporsi perempuan yang berada di posisi strategis

PROGRAM 2: Program pelatihan pengembangan kapasitas

Keaktifan 1	Pelatihan Keterampilan Perempuan															
	1. Perempuan dan kader organisasi perempuan yang berkegiatan baik dan mampu melakukan advokasi isu-isu perempuan	kegiatan														
			1			1		1			1		400.000.000	Piantopi (Jelai dan Sodegohi) dan Kambisan		Wilyah Kabupaten Sembak

INDIKATOR : Program kerja yang dibekali kemampuan di DPMD																		
INDIKATOR : Program perempuan yang berada di pusat managerial																		
PROGRAM 1 : Program pelatihan pengembangan kapasitas																		
Kegiatan 1 Pelebaran Kapasitas Perempuan	1. Peningkatan dan keberagaman perempuan yang berdaya baik dan mampu melakukan aktivitas ke-3 di perempuan	Kegiatan										MG Sumbas						
	2. Lebih baik-keterampilan perempuan yang berkualitas	Kegiatan										MG Sumbas						
TUJUAN B : AIR BERSIH DAN LEBATAN LAJUK																		
INDIKATOR : Program Penguatan perubah yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan																		
PROGRAM 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Air minum bagi masyarakat																		
Kegiatan 1 Mendorong perbaikan kualitas Air Bersih PDAM	Peningkatan kualitas air bersih PDAM kawasan Sumbas dan Adakan pemantauan rutin	Proyek Rutin								1	1	1	1	30.000.000	Pelatihan dan Penataan			Sipah Matigaher Sumbas
INDIKATOR : Pada tahun 2020, meningkatkan kualitas air dengan mendorong perilaku, meningkatkan partisipasi, dan meminimalkan polusi sumber air dan limbah domestik																		
PROGRAM 1 : Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)																		
Kegiatan 1 :																		
Ipteka bagi Masyarakat (iBM) di Desa Teluk Sungai dalam menghadapi Permasalahan	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan pemahaman masyarakat Prototipe alat pemisah air bersih	kelompok masyarakat	1											4600000	Kemristekdikti	teknis	Poltara	
	Kegiatan : 2																	
Instansi Air Bersih Dengan Menggunakan Bahan Perjemih Lokal Secara Otomatis di Dusun Sebangang	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan ekonomi Peningkatan pemahaman masyarakat Prototipe alat pemisah air bersih	kelompok masyarakat												7100000	Poltara	sebangang	Poltara	
TUJUAN B : Energi Bersih dan Terjangkau																		
INDIKATOR : Pada tahun 2020, mencapai akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern																		
PROGRAM 1 : Penelitian																		
Kajian Sumber Energi Terbarukan Berbasis PLTMH di Desa Tamajak Kabupaten Sumbas	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa													8400000	Peneliti	tanajak	Poltara	
Efektivitas Sistem Tata Kelola Pengganda Irigasi Pompa dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Study Kasus di Desa Sepadu Kecamatan Sepuruk Kabupaten Sumbas di Kabupaten Sumbas	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa													14000000	Kemristekdikti	sepadu, sepuruk	Poltara	
Rancang Bangun dan Uji Kinerja Pengerig dengan Sistem Puzangkat Paras Mengikuti Poni	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa													20000000	Kemristekdikti	sumbas	Poltara	
INDIKATOR : Mengembangkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan efektif, pencapaian sasaran kerja rakyat, transparansi, kredibilitas dan inovasi, dan mendorong																		
PROGRAM 1 : Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)																		
Melejitkan Ekonomi Mikro Keripuk di Desa Parit Bura Selakan Kabupaten Sumbas	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan ekonomi Peningkatan pemahaman masyarakat	kelompok masyarakat	1											42500000	Kemristekdikti	selakan	Poltara	
	Pelatihan Pembustan Abon Ulang Rebon sebagai oleh-oleh khas Wisata di Wilayah Pesisir	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan ekonomi Peningkatan pemahaman masyarakat	kelompok masyarakat	1											43000000	Kemristekdikti	parit	Poltara
Pengolahan Saos Pepaya Untuk Diversifikasi Produk dan Meningkatkan Pendapatan Bagi		Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan ekonomi Peningkatan pemahaman masyarakat	kelompok masyarakat	1											5302000	Poltara	sumbas	Poltara
	iBM Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro Wirausaha Mahasiswa "Buka Tangan Khas Sumbas"	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan ekonomi Peningkatan pemahaman masyarakat	kelompok masyarakat	1											6714000	Poltara	sumbas	Poltara
Ipteka bagi kewirausahaan di Politeknik Negeri Sumbas		Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan pemahaman masyarakat	Mahasiswa	1											10000000	Kemristekdikti	sumbas	Poltara
	PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN WIRALUSAHA UNTUK	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan ekonomi Peningkatan pemahaman masyarakat	kelompok masyarakat								1	1			11320000	Poltara	sumbas	Poltara

PENGOLAHAN ABON IKAN LELE SEBAGAI UPAYA DIVERSIFIKASI PRODUK	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Peningkatan ekonomi Peningkatan pendapatan masyarakat	kelompok masyarakat				1	1				9500000	Poltek	lumbang	Poltek
PENGEMBANGAN PRODUKSI LELE KOLAM TERPAL DI DESA LUMBANG	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa	kelompok masyarakat				1	1				11000000	Poltek	lumbang	Poltek
Penelitian														
Analisa Finansial Usaha Pupuk Organik Kelompok Tani Usaha	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Kelayakan Finansial Usaha Pupuk organik										4000000	Poltek	sambi	Poltek
Pemetaan dan Strategi Pengembangan Usaha Kecil Mengolah Pengolahan Produk	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa Strategi pengembangan usaha Pemetaan usaha pengolahan produk perikanan					1					82500000	Kemristekdikti	sambi	Poltek
8.8 Melibatkan baik-baik tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjaga bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya														
Penelitian														
ANALISA RESIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT.SARANA ESA CITA	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa								1		8000000	Poltek	sambi	Poltek
8.9 Pada tahun 2020, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.														
Penelitian														
Pemetaan dan Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Industri Pertanian di Kabupaten Sambas	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa								1		26000000	Kemristekdikti	sambi	Poltek
Kajian Daya Saing Sektor Pariwisata Kabupaten Sambas Terhadap Wilayah Sekitarnya	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa							1	1		18000000	Kemristekdikti	sambi	Poltek
Upaya Pemulihan Pariwisata Budaya Pasa Kodik Etnis Melayu-Madura di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa										11600000	Kemristekdikti	sambi	Poltek
Rencana Pengembangan Lintasp Agrowisata di Kawasan Bukit Pantes Sejangkung	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa					1					11600000	Kemristekdikti	sejangkung	Poltek
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)														
Perilaku kelompok tani wisata (POKDARWIS) dalam Mendukung Pengembangan Keperawatan di Kabupaten Sambas	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa	kelompok masyarakat									4000000	Poltek	sumbar harapan	Poltek
Pengembangan Potensi Temajak Sebagai Destinasi Pariwisata di Kabupaten Sambas	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa										11600000	Kemristekdikti	temajak	Poltek
Peningkatan Keterampilan Kelompok Sadar Wisata Dalam Mengolah Produk Tani di Desa Sambar Harapan	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa	kelompok masyarakat				1	1				11350000	Poltek	sumbar harapan	Poltek
Pelatihan dan Peningkatan Wirausaha untuk anggota PKK dalam Meningkatkan Perakonomian Perumahan di Desa	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa					1					11320000	Poltek	lumbang	Poltek
MANAJEMEN USAHA TANAMAN KELAPA SAWIT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DI DESA LUMBANG KECAMATAN SAMBAS	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media massa					1	1				11100000	Poltek	lumbang	Poltek

PEMBUATAN KUE BROWNIES DENGAN BAHAN DASAR UBI RAMBAT DAN LABU KUNING SEBAGAI USAHA NILAI TAMBAH PENDAPATAN KELUARGA DI DESUN SERAMBANG DESA SEBAYAN KECAMATAN SAMBLAS	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media masa	kelompok masyarakat					1	1					11525000	Polhisa	sebayan	Polhisa
---	---	---------------------	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	----------	---------	---------	---------

TUJUAN 5. PERSEDIAAN LINGKUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI
INDIKATOR: Meningkatkan berbagai pelayanan yang mendukung kegiatan produktif, meningkatkan lapangan kerja layak, berwawasan, kreatifitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha skala kecil dan menengah, termasuk modal akses terhadap jasa keuangan

PROGRAM 1: Program Pembinaan dan Penguatan Usaha Usaha Dooooni Keluarga Masyak

Raglan 1:																					
Peserta pelatihan ekonomi	Keluarga Masyak meningkatkan kualitas hidupnya	Kapala Keluarga											600	600	600	600	304.800.000	Pilantropi (jark dan Dooooni), dan Penguatan		Ayiah Kabupaten Sambas	
Raglan 2:																					
Pelatihan penguasaan, pemaksimalan dan penguatan Penguatan	Keluarga Masyak yang memiliki usaha	Kapala Keluarga											600	600	600	600	180.000.000	DO, Pilantropi (jark dan Dooooni), dan Penguatan		Ayiah Kabupaten Sambas	
Raglan 3:																					
Skala Dooooni ke Kelompok Usaha Loh	Meningkatkan kemampuan keterampilan ekonomi	Kapala UBAH											1	1	1	1	25.000.000	DO, Pilantropi (jark dan Dooooni), dan Penguatan		Ayiah Kabupaten Sambas	
Raglan 4:																					
Penguatan kerjasama kelompok	Meningkatkan kemampuan keterampilan ekonomi	Kapala UBAH											30	30	30	30	27.300.000	DO, Pilantropi (jark dan Dooooni), dan Penguatan		Ayiah Kabupaten Sambas	
Raglan 5:																					
	Kegiatan 1 : Bantuan Modal usaha mikro													0	2	4	4	137.000.000			Lalima
	Kegiatan 2 : Penguatan Formalisasi Keuangan																				

10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarsektora

10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan perkapita yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Penelitian	Penaruh PDRB Pendidikan dan Penguatan Terhadap	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media masa																11600000	Kemristekdikti	sambas	Polhisa
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	--------	---------

11. Meningkatkan Pada Produktif dan Komunitas yang Berkelanjutan

11.5 Pada tahun 2030, secara otomatis mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, dan ulang, dan penggunaan kembali.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)																						
BANK Sampah Sebagai Solusi Pengelolaan Sampah Masyarakat Desa Sebayan																						
	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media masa	kelompok masyarakat																	6350000	polhisa	sebayan	Polhisa
	Peningkatan ekonomi																					
	Peningkatan pendapatan masyarakat																					

14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur penangkapan dan mengontrol penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memastikan persediaan ikan secara layak dalam

Penelitian																						
Tingkat Degradasi dan Depresiasi Sumberdaya Ikan Pelagis Besar di Perairan Kabupaten Sambas	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media masa																		11600000	Kemristekdikti	sambas	Polhisa
Kajian Pengkaji Sumberdaya Perikanan Tangkap di Perairan Kabupaten Sambas	Publikasi Jurnal/media elektronik/ media masa																		12500000	Kemristekdikti	penangkal	Polhisa

C. MATRIKS TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kode Indikator	Target-Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian											
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun																
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari																
1.1.1	Tingkat Kemiskinan ekstrim	Indikator Global yang akan dikembangkan														
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional																
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok	BPS (Sensus), Dinas Sosial	%	9,42	9,13	8,54	8,84	8,59	8,56	8,55	8,27		7,98		7,69	
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Indikator Global yang akan dikembangkan														
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan																
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, penangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan															
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui BPJS Bidang Kesehatan	BDYT (Basis Data Terpadu), BPJS			32	32	35	35	58		65		80		100	
1.3.1 (b)	Proporsi peserta jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, BPJS (Sakeras)														
1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	BPS														
1.3.1 (d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial	KPM	6,108	9,393	9,374	9,374	9,172	18,703	18,699						
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro																
1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar															
1.4.1 (a)	Persentase Perempuan Pemah Kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	BPS (SUSENAS)	%	58,54		79,94		81,91		85,59						
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	BKKBN bekerjasama dengan BPS : SDKI		83		84		84		85		86		87		88
1.4.1 (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	BKKBN bekerjasama dengan BPS : SDKI		61,4	61	61,8	61,5	62,7	62,6		63		63,4		63,8	
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	BPS (SUSENAS)	%	90,01		89,06		93,17		91,88						
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Dinas Perkim LH/BPS	%	46,97	47,20	34,58	57,10	88,66	58,30	89,78	59,50		60,65		61,50	
1.4.1 (f)	Persentase rumah tangga rumah	Dinas Perkim LH/BPS	Kepala Rumah Tangga	379	-	-	73	73	137	166	140		-		-	
1.4.1 (g)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	BPS	-	89		91,5		97		91,4		91,45		93,23		91,51

2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kelangkaan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan secara internasional untuk anak pemerk dan kurus di bawah usia 5 tahun, memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta mamula.													
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/belita	Diras Kesehatan		38.2	32	31	37						29.55
2.2.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/budita	Diras Kesehatan	%	34.2	32	38.5	36	21.06	34.44	21.60	32.81		31.18
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun	Diras Kesehatan											
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Diras Kesehatan		5.86		8.46		7.72					
2.2.2(b)	Perentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Diras Kesehatan		66		67.03		65.85					
2.2.2(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Diras Pangan, Nakeswan	Skor	72.8	76.7	75.3	80.6	79.2	84.5	79.2	88.4	92.2	96.1
2.3 Pada tahun 2030, meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat peduduk asli, keluarga petani, pengembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan liput lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian													
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	BPS (Kalder Dalam Angka)	Juta Rupiah	33.946				41.621					
2.3.1(a)	Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gub, daging sapi, ikan dan ayam	Diras Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura											
	- Padi	Diras Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura		286.501	310.000	282.597	310.000	212.593	315.000	287.181	320.000	325.000	330.000
	- Jagung	Diras Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura		67	512	331	1.580	1.558	1.600	6.759	1.650	1.700	
	- Kedelai	Diras Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura		1.908	1.450	1.421	1.475	270	1.500	670	1.550	1.600	
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status	Indikator Global yang akan dikembangkan											
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah.													
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian berkelanjutan	Indikator Global yang akan dikembangkan				0		0		1			
2.5 Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik hasil, tanaman budidaya dan hewan ternak dan perburuan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dilekida dan diinkubasikan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta melindungi akses terdapat pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang ditetapkan secara internasional.													
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Diras Pangan, Nakeswan											
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan : berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui	Diras Pangan, Nakeswan											
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perbaikan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif													
2.a.1	Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian	Indikator Global yang akan dikembangkan											
2.a.2	Total Bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Indikator Global yang akan dikembangkan											
2.b. Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bertahap segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat Delta Development Round.													
2.b.1	Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen	Indikator Global yang akan dikembangkan											
2.b.2	Subsidi ekspor pertanian	Indikator Global yang akan dikembangkan											
2.c. Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta lurusnya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu memulainya volatilitas harga pangan yang ekstrem.													
2.c.1	Indikator anomali harga pangan	Indikator Global yang akan dikembangkan											

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

3.1 Pada tahun 2030, mengurangi risiko angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup															
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	BPS : Sensus Perilaku (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUSPAS)	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia		data hasil Supas belum tersedia		data hasil Supas belum tersedia		data hasil Supas belum tersedia		data hasil Supas belum tersedia		data hasil Supas belum tersedia	
3.1.2*	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	BPS (SUSENAS)	%	100		100						98,23			
3.1.2(a)	Persentase perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas	BPS (SUSENAS)	%	58,54		79,94	81,91	81,91				85,59			
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara bermata memandang Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KB (Gedahnya Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000															
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	BPS : SP dan SUPAS, BKKBN bekerjasama dengan BPS (SDKD)	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	BPS : SP dan SUPAS, BKKBN bekerjasama dengan BPS (SDKD)	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia	data hasil Supas belum tersedia
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Dinas Kesehatan	orang			113	12,44/1000	8,5/1000	12,41/1000	8,5/1000	0	-	0	-	0
3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%			91,50%	84,30%	92	86,40%	92,5 (s/d Agustus)	43%	93			
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis															
3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi HIV														
3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Dinas Kesehatan	< 0,5/100000	19	3	29	3	56	3	35	3	34	3	32	3
3.3.2	Kasus TB per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	1,4/1000	761	1,4	745	1,4	805	1,4	908	1,4	908	1,4	908	1,4
3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	379/100000	761	2019	745	2007	805	1939	908	1919	900	1900	889	1880
3.3.3*	Kasus Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	< 1/1000	10	15	10	10	6	8	3	7	3	6	3	5
3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Dinas Kesehatan	< 1/10000	6	6	4	6	3	6	3	6	3	6	3	6
3.3.5(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.5(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan															
3.4.1	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit														
3.4.1(a)	Persentase merokok pada penduduk umur < 18 tahun	Dinas Kesehatan (Rikesdas)													
3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan (Rikesdas)													
3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun	Dinas Kesehatan (Rikesdas)													
3.4.2*	Angka Kematian (insiden rata) akibat bunuh diri	Dinas Kesehatan, Kepolisian RI													
3.4.2(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki mekanisme yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	KABUPATEN					1 (28 puskesmas)	1 (28 puskesmas)	1 (28 puskesmas)	1 (28 puskesmas)	1 (28 puskesmas)	1 (28 puskesmas)	1 (28 puskesmas)	1 (28 puskesmas)
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol membahayakan															

3.5.1 (a)	Jumlah penyalahgunaan narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mendapat layanan rehabilitasi medis	BNN, Dinas Kesehatan																
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	BNN, Dinas Kesehatan																
3.5.1(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam negeri sesuai standar pelayanan	BPS (Kalbar Dalam Angka), RSJD Sei Bangkong																
3.5.1 (d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	BNN, Dinas Kesehatan, RSJD Sei Bangkong																
3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN, Dinas Kesehatan, RSJD Sei Bangkong																
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur > 15 tahun dalam satu tahun terakhir	BPS : SUSENAS																

3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.

3.6.1	Angka Kematian akibat cedera lalu lintas	Indikator Global yang akan dikembangkan																
-------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	BKKBN bekerjasama dengan BPS : SDKI	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi									
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	BKKBN bekerjasama dengan BPS : SDKI	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi									
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	BKKBN bekerjasama dengan BPS : SDKI	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi	Data tidak tersedia hingga level kabupaten, hanya level provinsi									
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	SDKI, SP, SUPAS	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia	Data belum tersedia									
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (RTR)	BPS : SP dan SUPAS, BKKBN bekerjasama dengan BPS :	2,9	2,9	2,91	2,86	2,90											

3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

3.8.1 (a)	Umat need pelayanan kesehatan	BPS : SUSENAS																
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan masyarakat per 1.000	BPS : SUSENAS																
3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan	BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan																

3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kecacatan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

3.9.1	Angka Kematian akibat bencana dan polusi udara ambient	Indikator Global yang akan dikembangkan																
3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis	Indikator Global yang akan dikembangkan																
3.9.3	Angka kematian akibat keracunan	Indikator Global yang memiliki risiko dan akan dikembangkan																
3.9.3.(a)	Proporsi Kematian akibat keracunan	Dinas Kesehatan																

3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.

3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur > 15 tahun	BPS	%	17,36*	16,9*	24,43				Data Tidak Tersedia								
--------	--	-----	---	--------	-------	-------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.c. Meningkatkan penerapan dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular yang terutama berpegang teguh pada kepastian, ketersediaan akses terjangkau obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai dan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh WHO, yang memastikan bahwa semua penduduk memiliki akses mudah, terjangkau, dalam kuantitas yang layak, akses, dan kualitas. Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan untuk mendukung dan melaksanakan program pelayanan obat dan vaksin.															
3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan													
3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Diras Kesehatan													
3.b.2	Total Official Development Assistance (ODA) untuk penelitian kolektif dan sektor kesehatan dasar	Indikator Global yang akan dikembangkan													
3.c.1*	Kepuasan dan distribusi tenaga	Diras Kesehatan													
3.d.1	Kapasitas Persepsi Kesehatan Internasional (IHR) dan Keselamatan dalam kesehatan	Indikator Global yang akan dikembangkan													
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua															
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.															
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja : (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kompetensi minimum dalam : (i) membaca, (ii) matematika	Diras Pendidikan dan Kebudayaan													
4.1.1. (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Diras Pendidikan dan Kebudayaan													
4.1.1. (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Diras Pendidikan dan Kebudayaan													
4.1.1. (c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Diras Pendidikan dan Kebudayaan													
4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sederajat	Diras Pendidikan dan Kebudayaan	%	112,08%	111,60%	115,8%	111,25%	109,30%	110,15%	110,67%	108,84%	-	107,25%	-	105,29%
4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs sederajat	BPS : SUSENAS	%	77,4	97,8	75,7	97,91	83,13	98,21	84,87					
4.1.1. (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SME/ MA sederajat	BPS : SUSENAS	%	90,56		78,64		86,45		80,71					
4.1.1. (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur > 15 tahun	BPS : SUSENAS													
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk memasuki pendidikan dasar.															
4.2.1	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	Indikator Global yang akan dikembangkan													
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan													
4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	BPS : SUSENAS	%	44,05	47	45,31	48	52,82	50,26	33,45					
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.															
4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan													
4.3.1. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SME/MA sederajat	BPS : SUSENAS	%	90,56		78,64		86,45		80,71					
4.3.1. (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS : SUSENAS, PUSDATIN	%	10,81		16,02		20,16		7,49*	(Data Tidak dipublikasikan karena RSE terlalu besar)				
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan rang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.															

6.6.1 (c)	Jumlah dana yang mematu tingkat erosi	Dinas Perkim LH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.6.1 (d)	Tuas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Dinas Perkim LH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.6.1 (e)	Jumlah DAS prioritas yang difundangi mata airnya dan dipulihkan	Dinas Perkim LH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.a. Pada tahun 2030, memperbaiki kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program terkait air dan sanitasi, termasuk pemanasan air, desalinsi air, efisiensi air, pengolahan air limbah, air ulang dan teknologi daur ulang.																
6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belajar	Indikator Global yang akan dikombinasikan														
6.b. Mendukung dan memperbaiki partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.																
6.b.1	Proporsi unit pemerintahan lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi	Indikator Global yang akan dikombinasikan														
7. Menjamin Akses Energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua																
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.																
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas ESDM, BPS														
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas ESDM, BPS														
7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih															
7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Dinas ESDM														
7.1.2 (b)	Rasio penyediaan gas rumah tangga	BPS, Dinas ESDM														
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global																
7.2.1*	Daerah energi terbarukan	Dinas ESDM														
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.																
7.3.1*	Intensitas energi primer	Dinas ESDM, BPS														
7.a Pada tahun 2030, memperbaiki kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan aset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi																
7.a.1	Termobilisasi dana per tahun (US\$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$100 Miliar	Indikator Global yang akan dikombinasikan														
7.b Pada tahun 2030, memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara berkembang.																
7.b.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan	Indikator Global yang akan dikombinasikan														
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pelajaran yang layak untuk semua.																
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.																
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	persen	10.06		8.84		8.64		8.08						
8.1.1 (a)	PDB per kapita	BPS	Juta Rupiah	27.98		30.45		33.08		35.76						
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.																
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS														
8.3 Mengadopsikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendukung formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap keuangan.																
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis	BPS														
8.3.1 (a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS : SAKERNAS	%	29.49		sakernas tahun tidak		data belum tersedia		32.93						
8.3.1 (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS : SAKERNAS	%	L=44.81 P=69.16		sakernas tahun tidak		data belum tersedia		67.84						

8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance bagi negara kurang berkembang.													
8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan	Indikator Global yang akan dikembangkan											
8.b. Pada tahun 2020, mengadopsikan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization													
8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB	Indikator Global yang akan dikembangkan											
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi													
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.													
9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan											
9.1.1.(a)	Kredisi mantap jalan nasional	Dinas PUPR											
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol	Dinas Perhubungan											
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api												
9.1.2	Jumlah penumpang dan volume penerbangan, menurut jenis	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan											
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dinas Perhubungan											
9.1.2.(b)	Jumlah darataga penerbangan	Dinas Perhubungan											
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan											
9.2 Memproseskan industri/ jasa inklusif dan berkelanjutan, pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.													
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkaps	BPS	persen	12,47		12,41		12,58		12,1			
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	BPS	persen	3,96		4,5		4,5		3,67			
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	BPS	%	L-6,32 P-2,85		merkum tahunan tidak		L- 13,39 P-6,14		L-26,06 P-7,57			
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.													
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	BPS											
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	BPS											
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dibuktikan semua negara sesuai kemampuan													
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Dinas Perkim LH		-		-		-		-		-	
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Kaca	Dinas Perkim LH		-		-		-		-		-	
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan													
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	BPKPD, BPS											
9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk	Indikator Global yang akan dikembangkan											
9.a Mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui penduktan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkemuka dan negara-negara													
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur	Indikator Global yang akan dikembangkan											
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.													
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan besar terhadap total nilai	Indikator Global yang akan dikembangkan											
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengwujudkan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2021.													
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang mempunyai memiliki telepon genggam	BPS	%	53,38		54,59		63,79		59,37			

11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.															
11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukkan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintah (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan													
11.4.1.(a)	Jumlah kota peserta di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas PUPR													
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terluka, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.															
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPPBD													
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPPBD													
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPPBD													
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPPBD, BMKG, Dinas PUPR dan Dinas ESDM													
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPPBD													
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.															
11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan													
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Perkim LH	%	33.34	45.61	43	53.53	54.9	55.85	71.78	0	71.93	0	72.07	0
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas PUPR													
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, muda dan penyandang disabilitas.															
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan													
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas PUPR													
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melapor ke kepolisian.	IPS													
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.															
11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.	Indikator Global yang akan dikembangkan													
11.b Pada tahun 2028, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta															
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPPD, Bappeda													
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPPD, Bappeda													
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.															

11.c.1	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumbernya yang efisien, berkelanjutan dan bertanggung dengan memanfaatkan bahan lokal	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia																
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan																		
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan																		
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quinquennial																	
12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengabdian berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.																		
12.2.1	Jejak material (material footprint)	Indikator Global yang akan dikembangkan																
12.2.2	Konsumsi material domestik (domestic material consumption)	Indikator Global yang akan dikembangkan																
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.																		
12.3.1	Indeks kehilangan makanan global	Indikator Global yang akan dikembangkan																
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengabdian bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk																		
12.4.1	Ambil pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbayar untuk memantapkan komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-	Indikator Global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan																
12.4.1(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BERU	Dinas Perkim LH	Badan Usaha	-	3	1	3	2	3	3	4	-	5	-	5	-		
12.4.2	Jumlah limbah B3 yang terakumulasi dan proporsi limbah B3 yang ditolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Indikator Global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan																
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.																		
12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, tin bahan daur ulang	Indikator Global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan																
12.5.1(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Perkim LH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6 Memerintahkan perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.																		
12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan	Indikator Global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan																
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	Dinas Perkim LH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7 Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.																		
12.7.1	Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan	Indikator Global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan																
12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang terdaftar	Dinas Perkim LH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat dijaminan memiliki informasi yang relevan dan berdaya guna terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang seharas dengan alam.																		
12.8.1	Sejumlahnya (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diintegrasikan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan masyarakat dan (d)	Indikator Global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan																
12.8.1(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan terdaftar	Dinas Perkim LH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.9 Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.																		

12.a.1	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan	Indikator Global yang akan dikembangkan																		
12.b. Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap paritas berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.																				
12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati	Indikator Global yang akan dikembangkan																		
12.c. Merasionalkan subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dievakuasi oleh																				
12.c.1	Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil	Indikator Global yang akan dikembangkan																		
13. Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.																				
13.1 Memperluas kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.																				
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRR) tingkat nasional dan	IPPHD																		
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	IPPHD																		
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.																				
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	Dinas Perkim LII																		
13.2.1(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dagpedia																		
13.3 Meningkatkan pendidikan, pertumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan pengurangan dini perubahan iklim.																				
13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peningkatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi	Indikator Global yang akan dikembangkan																		
13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembelajaran	Indikator Global yang akan dikembangkan																		
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam iklim aksi																				
13.a.1	Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara skuitabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia																		
13.b Mengembangkan mekanisme untuk membagikan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.																				
13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk loanan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia																		
14. Melindungi dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan.																				

15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.												
15.2.1	Kemajuan capaian pengelolaan hutan lestari.	Indikator Global yang memiliki risiko dan akan dikembangkan										
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.	Dinas Kehutanan										
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Dinas Kehutanan										
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Dinas Kehutanan										
15.2.1.(d)	Jumlah Kawasan Pengelolaan Hutan.	Dinas Kehutanan										
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.												
15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator Global yang memiliki risiko dan akan dikembangkan										
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Kehutanan										
15.4 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayati, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.												
15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati penunjang dalam kawasan lindung.	Indikator Global yang akan dikembangkan										
15.4.2	Indeks tutupan hutan pegunungan.	Indikator Global yang akan dikembangkan										
15.5 Melindungi lintasan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dan pada tahun 2020, melindungi dan memulihkan jaringnya spesies yang terancam punah.												
15.5.1*	Perentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Rabat Konservasi Sumber Daya Alam										
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.												
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislas, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik.											
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi perikanan dan pasokan produk kehidupan liar secara legal.												
15.7.1	Proporsi habitat liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Indikator Global yang memiliki risiko dan akan dikembangkan										
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Dinas Perkim LH										
15.7.1.(b)	Jumlah perambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembalikan pada lembaga konservasi.											
15.8 Pada tahun 2020, memperkembangkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.												
15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pemberantasan jenis asing.	Indikator Global yang memiliki risiko dan akan dikembangkan										
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati.											
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurusan lingkungan.												
15.9.1	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aksi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020	Indikator Global yang memiliki risiko dan akan dikembangkan										
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Bappoda										
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melindungi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.												

17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang	Indikator Global yang akan dikembangkan																		
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama trianglular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui kowordnas yang lebih baik																				
17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya	Indikator Global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan																		
17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular																			
17.6.2	Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepataannya	Indikator Global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan																		
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan ibukota	Dikominfo																		
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pralabel (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan	Dikominfo, BPS																		
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dikominfo																		
17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, difusi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan komersial dan preferensi, yang ditetapkan bersama																				
17.7.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan memelihara teknologi yang ramah	Indikator Global yang akan dikembangkan																		
17.8 Mengpersedulikan/mentraktir secara penuh baik teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang menantang, khususnya teknologi informasi dan komunikasi																				
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS																		
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Dikominfo																		
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk memelihara pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-																				
17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular) yang direalisasikan untuk negara-negara berkembang	Indikator Global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan																		
17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia																			
17.10 Mengadopsikan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesigupaan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda																				
17.10.1	Rata-rata tarif terbebas dunia Free Trade Agreement (FTA)																			
17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbebas di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara)	BPS																		
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan daya beli bagi proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020																				
17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global	Indikator Global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan																		
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Indikator Global yang memiliki prospek dan akan dikembangkan																		
17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan asalitas (rules of origin) yang dapat																				
17.12.1	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil	Indikator Global yang akan dikembangkan																		
17.3 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan																				
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makro ekonomi	BPS, Bank Indonesia, Bappoda																		
17.4 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan																				

17.19.1	Nilai dolar atau setara rupiah yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan																		
17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistik dan pramuka komputer pada Kementerian/Lembaga	BPS	pegawai	0	0	0				4										
17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistik dan/atau pramuka komputer	BPS																		
17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistik dan pramuka komputer Kementerian/Lembaga	BPS	%	0	0	0				13.79										
17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Pertumbuhan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian	Indikator Global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan																		
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Pertumbuhan pada tahun 2020	BPS																		
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)																			
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	BPS	Pengunjung	5073	8649	7052				8255										
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses dan Badan Pusat Statistik (BPS)	BPS	persen		91.01	94				98.55										
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	BPS	persen		0	38.33				62.5										

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

